

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Rakyat Merdeka

PELECEHAN SESAMA JENIS HANTUI OJOL

SERANG, BANPOS - Kekerasan seksual di Banten menunjukkan pola yang semakin kompleks. Jika selama ini korban identik dengan perempuan dan anak, kini laki-laki juga mulai mengaku men-

jadi sasaran pelecehan seksual. Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Kota Serang mengaku mengalami perlakuan tidak senonoh dari penumpang
BACA PELECEHAN HAL-9

Jual Seragam, Kepsek Siap-Siap Dicopot

SERANG, BANPOS - Kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kota Serang terancam dicopot dari jabatannya apabila tetap melakukan pungutan terhadap siswa baru atau mengoordinasikan

pembelian seragam sekolah. Sanksi tersebut ditegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang melalui Surat Edaran Nomor 134.1728/Dikbud/2026 tentang Larang-

an Pungutan Biaya Siswa Baru dan Ketentuan Pengadaan Seragam Sekolah Tahun Ajaran 2026.

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, surat edaran itu

diterbitkan sebagai tindak lanjut arahan Walikota Serang agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berlangsung tanpa pungutan yang membebani orang tua siswa. "Kami mene-

gaskan kepada seluruh SD dan SMP negeri bahwa sekolah dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun kepada siswa baru yang telah dinyatakan
BACA JUAL HAL-9

PEMROV GAMANG EKSEKUSI SITU RANCAGEDE

SERANG, BANPOS - Kemenangan Pemerintah Provinsi Banten dalam sengketa Situ Rancagede di tingkat kasasi belum diikuti langkah eksekusi. Hingga kini, pemerintah memilih menahan pelaksanaan putusan sembari mengkaji amar putusan Mahkamah Agung (MA) dan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

Wakil Gubernur Banten A. Dimiyati Natakusumah mengatakan, saat ini Pemrov masih menginventarisasi dan mempelajari substansi putusan kasasi agar tidak keliru dalam menafsirkan amar putusan. "Kalau nanti benar menjadi milik kita sesuai putusan, tentu akan kami tata. Tetapi kami harus mengkaji dulu isi putusan itu. Tidak bisa serta-merta langsung melakukan eksekusi karena kami tidak ingin salah dalam menerjemahkannya," kata Dimiyati, Rabu (8/7).

Menurutnya, kajian diperlukan karena terdapat sejumlah poin dalam amar
BACA PEMPROV HAL-9



DZIKI OKTOMAUJIYADI/BANTEN POS

Vox Populi



Azmart Tusnedi

REDAKTUR PELAKSANA BANTEN POS

Menguji Integritas Pemimpin: Harta, Tahta, Wanita

MENJADI orang penting berarti menyerahkan diri sepenuhnya untuk terus berada di bawah pengawasan ketat rakyat setiap saat. Setiap jejak rekam masa lalu, sekecil apa pun, kini rentan menjadi konsumsi publik di era transparansi digital.

Ketimpangan moral sering muncul saat godaan harta dan tahta telah digenggam erat oleh para elit politik lokal. Integritas kini seolah menjadi barang langka di tengah masifnya praktik korupsi demi menumpuk kekayaan pribadi secara instan.

BACA VOX POPULI HAL - 9

BERANTAS ANJAL HANYA WACANA

Foto kolase beberapa Anak Jalanan (Anjal) beraktivitas di Kota Serang, Rabu (8/7). Meski di beberapa kesempatan akan melakukan aksi pemberantasan yang berkedok razia akan dilakukan Pemkot Serang dan Pemrov Banten, namun hingga kini hanya wacana dan anjal semakin merajalela.

KARANG BOKOR, PANGGUNG SENJA SAMUDRA HINDIA

Oleh: Taufiq Solehudin

DEBURAN ombak Samudra Hindia terdengar bersahutan menghantam tebing karang. Angin laut berembus kencang, membawa aroma khas pesisir yang

bercampur dengan udara segar. Dari bibir tebing yang menjulang, hamparan laut biru membentang tanpa batas, seolah menyatu dengan langit di kejauhan.

Itulah suasana yang menyambut setiap pengunjung di Karang Bokor, salah

BACA KARANG HAL - 9

TAUFIQ SOLEHUDIN/BANTEN POS



Panorama Pantai Karang Bokor Sawarna, Kabupaten Lebak.

BAPPEDA BANTEN DITERPA ISU POTONGAN ANGGARAN

SERANG, BANPOS - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten diterpa isu dugaan permintaan potongan anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2026. Informasi yang beredar di internal organisasi itu disebut memicu keresahan karena diklaim sebagai pola baru dalam penyusunan program dan kegiatan.

BACA BAPPEDA HAL - 9

PEMKAB PERANGI HOAKS
DEMI TINGKATKAN IMUNISASI ANAK

03

PERJALANAN DINAS DEWAN
RATUSAN JUTA DIDUGA FIKTIF

04

API DI TPA JATIWARINGIN
MASIH MENYALA

05

KOMISI IV DORONG
PENINGKATAN LAYANAN RSUD

06

FORUM DAN BKD
SILANG PENDAPAT

07

TERVERIFIKASI
DEWAN PERS



BANPOS CHANNEL

WWW.BANPOS.CO

BANTENPOS@GMAIL.COM

BANTEN_POS

BANTEN POS

HARGA ECERAN
RP 4.000

Polda Banten Gagalkan Penggelapan 44.500 Bungkus Rokok Ilegal



Jajaran kepolisian tunjukkan barang bukti rokok ilegal saat ungkap kasus di Polda Banten, Kota Serang, Rabu.

SERANG, BANPOS - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim-sus) Polda Banten menggagalkan upaya penggelapan sekaligus peredaran 44.500 bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai asal Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) Polda Banten, AKBP Bronto Budiyo, di Serang, Rabu (8/7), mengatakan kasus ini terungkap setelah Tim Patroli Maung Presisi Direktorat Samapta (Dit Samapta) Polda Banten mencurigai adanya aktivitas bongkar muat di sebuah gudang yang terletak di Kampung Sanding, Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa (7/7). "Kami mengamankan tiga orang terduga pelaku di lokasi kejadian, yakni MA selaku sopir ekspedisi, AHS selaku kenek truk, dan AT yang bertindak sebagai penerima barang atau penadah," ujarnya.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas Ditreskrim-sus Polda Banten mengamankan sejumlah barang

bukti penting, di antaranya 44.500 bungkus rokok ilegal atau setara 4.450 slop tanpa pita cukai dengan berbagai merek seperti Gigo, HMD, dan Dubai, satu unit armada bokd Isuzu Truk bernomor polisi B 9327 BXU, 89 kotak kardus besar yang digunakan untuk mengemas rokok dan tiga unit telepon genggam milik para tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, puluhan ribu rokok ilegal tersebut awalnya diangkut dari Surabaya dengan tujuan resmi ke Jakarta. Untuk mengelabui petugas keamanan selama di perjalanan, para pelaku menggunakan dokumen perjalanan atau Delivery Order (DO) palsu yang menyamarkan muatan sebagai produk garmen atau pakaian.

Namun di tengah jalan, sopir MA dan kenek AHS mengetahui bahwa isi muatan sebenarnya adalah rokok tak bercukai. Timbul niat buruk dari keduanya untuk menggelapkan komoditas tersebut. Karena AHS

merupakan warga Serang, ia kemudian menghubungi rekannya, AT, untuk menjadi penadah di wilayah Pabuaran. "Para pelaku sepakat menjual rokok ilegal ini seharga Rp75.000 per slop. Dengan total keseluruhan barang, nilai transaksi ilegal ini diperkirakan mencapai Rp330.000.000," katanya.

Beruntung, transaksi bernilai ratusan juta tersebut berhasil digagalkan sebelum uang sempat dibayarkan dan rokok belum sempat diedarkan ke masyarakat luas karena tim patroli langsung menyergap saat proses bongkar muat pertama kali dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, penyidik Ditreskrim-sus Polda Banten kini telah melimpahkan penanganan perkara beserta seluruh barang bukti ke pihak Bea Cukai Merak. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun. (ANT/PAY)

RUANG PUBLIK

Satu Tanah Air dalam Ragam Keyakinan

OLEH:

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Ketua Forum Diskusi dan Kajian
Liberal Banten Society



"Indikator paling otentik dari umat terbaik di hadapan Tuhan bukanlah klaim kebenaran yang paling lantang, melainkan seberapa besar kebermanfaatannya yang kita tebarkan bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang identitasnya."

Di balik sunyinya perenungan tentang hakikat ketuhanan yang selama ini saya jalani sebagai alumni Aqidah Filsafat, kabar mengenai penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 terasa seperti hembusan angin pagi yang menyejukkan. Secara normatif, langkah ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi saya, momentum ini bukan sekadar urusan administratif yang terselip dalam lembaran hukum negara, melainkan sebuah pengakuan atas nyawa tradisi yang selama ini hidup dalam sunyi dan terjaga di relung sanubari para leluhur. Sebagai Ketua Komunitas Kamus Sunda Banten yang berupaya merawat keluhuran dialek serta

kearifan lokal, saya melihat peristiwa ini sebagai titik balik penting dalam merajut kembali mozaik kemanusiaan nusantara yang sempat tercederai oleh sekat-sekat formalitas yang kaku.

Menengok sejarah pada 13 Juli 1945, saat para pendiri bangsa merumuskan fondasi konstitusi, mereka sejatinya telah meletakkan benih inklusivitas yang sangat dalam bagi masa depan negara ini. Para pendahulu kita memimpikan sebuah rumah besar di mana keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai anugerah yang harus dirawat dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Begitu pula bagi para penganut kepercayaan, seperti komunitas Sunda Wiwitan dengan konsep ajaran Cara Karuhun yang menekankan harmoni antara manusia dan alam, atau Ugamo Malim yang mengagungkan Debata Mulajadi Nabolon. Kini, pengakuan tersebut hadir sebagai bukti bahwa negara mulai berdamai dengan sejarah dan akarnya sendiri melalui kebijakan yang jauh lebih bijaksana dan merangkul semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam pandangan saya sebagai seorang pendidik sekaligus pengamat sosial, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah sebuah dekonstruksi atas paradigma yang selama ini membelenggu kebebasan nurani kita sebagai warga negara dalam administrasi kependudukan. Keputusan ini secara ontologis mengakui bahwa eksistensi Tuhan dapat dirasakan dan diyakini melalui berbagai jalan budaya serta tradisi yang sudah ada jauh sebelum agama-agama transnasional masuk ke tanah air tercinta. Memisahkan antara agama yang bersifat universal dengan kepercayaan leluhur bukan berarti memecah belah persatuan, melainkan upaya untuk mengembalikan martabat jati diri bangsa yang selama ini sering kali terpinggirkan oleh kategori-kategori yang dibawa oleh sejarah kolonial di masa lampau. Sebagaimana pendapat ilmuwan sosiologi agama, keragaman ekspresi religius justru menjadi

penanda kedewasaan sebuah bangsa dalam memandang realitas transendental.

Tantangan yang tersisa memang masih cukup besar, terutama jika kita melihat realitas di lapangan yang sering kali terjebak dalam euforia keberagaman yang kontra-produktif dan bersifat sektarian. Banyak orang merasa terancam oleh keberadaan keyakinan lain, padahal sejatinya ketakutan tersebut hanyalah cerminan dari kurangnya keyakinan terhadap kebenaran agamanya sendiri yang semestinya sudah sangat kokoh. Seseorang yang memiliki fondasi akidah yang kuat tidak akan pernah merasa cemas jika orang lain menempuh jalan yang berbeda menuju Sang Pencipta, karena ia paham bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan perlindungan yang agresif dari para pengikutnya. Fenomena insecurity teologis ini sering kali memicu tindakan intoleransi yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai substantif ajaran agama itu sendiri.

Dalam perspektif filsafat, ketakutan akan kehadiran yang lain adalah lawan dari kematangan teologis yang semestinya dipupuk oleh setiap penganut agama arus utama di Indonesia saat ini. Jika kita mampu menempatkan keyakinan pribadi sebagai jalan pulang yang privat dan mendalam, maka keberadaan komunitas penghayat tidak akan lagi dipandang sebagai pengusang ruang eksistensi bagi kita semua. Keteguhan dalam memegang prinsip hidup tidaklah harus disertai dengan upaya untuk memadamkan api keyakinan orang lain, melainkan dengan cara menjaga nyala api di dalam diri sendiri agar tetap bercahaya memberikan kehangatan bagi lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana dicontohkan dalam aliran Kapribaden yang mengajarkan laku hidup berdasarkan pengenalan identitas diri untuk mencapai kemuliaan hidup tanpa harus mendegradasi keyakinan pihak lain.

Toleransi yang kita bicarakan sejatinya tidak boleh berhenti pada tataran hubungan antara penganut agama mainstream

dengan kelompok penghayat kepercayaan saja. Jauh lebih esensial, kita harus memperluas cakupan toleransi ini ke dalam ruang lingkup antarumat beragama yang sudah mapan, di mana masing-masing pihak semestinya saling menghormati jalan ibadah yang dianut tanpa perlu merasa terganggu atau tersaingi. Ketika setiap pemeluk agama mampu meletakkan rasa curiga dan kecenderungan untuk memonopoli kebenaran, maka akan tercipta sebuah ekosistem sosial yang harmonis, yang memandang kemajemukan sebagai kekayaan batiniah bangsa yang harus dijaga bersama dengan semangat persaudaraan yang tulus. Prinsip ini selaras dengan semangat hidup berdampingan yang menjunjung tinggi martabat manusia di atas kepentingan golongan.

Lebih jauh lagi, tantangan yang lebih berat justru sering kali hadir dalam bentuk intoleransi internal yang terjadi di dalam satu payung agama yang sama, akibat perbedaan mazhab maupun cakrawala pemikiran. Sering kali, kita menyaksikan ketegangan yang muncul hanya karena adanya keragaman interpretasi terhadap teks suci atau perbedaan metodologi dalam menjalankan ritual harian yang sesungguhnya bisa disikapi dengan lebih arif. Mengakui bahwa perbedaan pemikiran adalah rahmat, alih-alih menjadikannya sebagai pemantik konflik, merupakan ujian tertinggi bagi kematangan iman seseorang. Dengan menumbuhkan ruang diskusi yang sehat dan empati yang luas di internal agama sendiri, kita akan belajar bahwa keberagaman bukanlah sebuah cacat, melainkan bukti otentik dari kedalaman dan kekayaan nalar manusia dalam memahami maksud Tuhan.

Inilah letak esensi dari konsep fastabiqul khoiroh atau berlomba-lomba dalam kebaikan yang sering kita dengarkan dalam setiap kesempatan keagamaan yang kita jalani. Indikator paling otentik dari umat terbaik di hadapan Tuhan bukanlah klaim kebenaran yang paling lantang, melainkan seberapa besar

kebermanfaatannya yang kita tebarkan bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang identitasnya. Ketika kebermanfaatannya menjadi kompas utama dalam bertindak, maka energi yang selama ini habis untuk berdebat atau merasa terancam akan tersalurkan sepenuhnya untuk membangun peradaban yang lebih inklusif dan manusiawi bagi generasi penerus kita nanti. Prinsip kebermanfaatannya universal ini melampaui sekat-sekat dogmatis yang selama ini sering kali membatasi ruang gerak dakwah yang inklusif.

Sebagai bagian dari warga Banten yang mencintai tradisi, saya sering menemukan banyak sekali istilah spiritual dan filosofi hidup dalam dialek lokal yang memiliki kedalaman makna luar biasa. Jika kita abai dalam memelihara serta mendokumentasikan kekayaan tersebut, maka kita secara tidak langsung sedang membiarkan akar pohon peradaban kita mengering dan hilang ditelan zaman. Itulah mengapa peran aktif komunitas seperti Kamus Sunda Banten menjadi sangat krusial dalam menjembatani literasi kultural agar nilai-nilai kearifan leluhur dapat tetap relevan dalam menjawab tantangan modernitas yang terus berkembang dengan sangat cepat di depan mata. Dokumentasi budaya bukan sekadar aktivitas akademis, melainkan langkah penyelamatan identitas bangsa yang harus terus diupayakan secara kolektif.

Menyikapi rencana peluncuran hari besar ini, saya yakin bahwa sikap paling bijak adalah dengan tidak ambil pusing terhadap suara-suara penolakan yang bernada sumbang di ruang publik. Penolakan tersebut sejatinya tidak perlu ada jika saja semua pihak mau membuka ruang dialog dengan hati yang jernih dan pikiran yang tidak terbelenggu oleh egoisme kelompok. Langkah negara untuk menetapkan hari ini sudah sangat tepat secara konstitusional, dan sebagai akademisi, saya merasa terpanggil untuk terus menyuarakan bahwa keragaman bukanlah musuh bagi harmoni, melainkan bukti nyata dari

kebesaran Sang Pencipta dalam menuliskan naskah kehidupan yang sangat agung. Integritas bangsa bergantung pada kemampuan kita dalam mengelola keberagaman ini menjadi kekuatan yang integratif bagi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Ke depan, tantangan bagi kita semua adalah bagaimana menurunkan pemahaman yang luhur ini ke dalam kurikulum pendidikan formal agar anak-anak didik kita sejak dini memiliki karakter yang toleran dan bijaksana. Kita harus menanamkan pemahaman bahwa beragama yang paling otentik adalah beragama yang paling mampu menghadirkan kedamaian serta kasih sayang bagi semua makhluk tanpa kecuali. Dengan begitu, kita berharap stigma negatif yang selama ini melekat pada kaum penghayat akan perlahan-lahan terkikis oleh pendidikan yang membebaskan dan inklusif bagi seluruh anak bangsa yang tinggal di bumi nusantara yang kita banggakan ini bersama-sama. Harapan akan masa depan Indonesia yang inklusif harus dimulai dari komitmen kolektif untuk menghargai setiap jalan keyakinan yang dipilih oleh warga negara sesuai dengan amanat hukum dan nuraninya masing-masing.

Mari kita terus menjaga komitmen untuk menabur kebaikan di mana pun kita berada demi meraih ridho Ilahi yang melampaui segala bentuk sekat administratif. Saya percaya bahwa dengan terus merawat keberagaman ini, Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang tidak hanya besar secara fisik, tetapi juga kaya secara spiritualitas dan kearifan budayanya. Semoga setiap langkah yang kita ambil hari ini, baik dalam dunia pendidikan maupun melalui komunitas budaya, dapat menjadi oase yang menyejukkan bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, keadilan, serta kedamaian yang sejati bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Keselarasan antara hak konstitusional dan kearifan lokal akan membawa kita pada peradaban yang lebih bermartabat di mata dunia. Wallahuallah.*

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Darmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan

Blok D, No.3, Kota Serang, Banten

Telepon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001

BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga | PEMIMPIN PERUSAHAAN: Saepudin | PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG

JAWAB: Chandra Magga | REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi | REDAKTUR: Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi | SEKRETARIS REDAKSI: Cahya Andini

REPORTER: CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardele | PENGEMBANGAN BISNIS: Sobar Rohmat | IKLAN: Zulfa Nadira

(Manager), Dody Fitriadi | FOTOGRAFER: Dziki Oktomauliyadi | PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji | GRAFIS: Ahmad Bukhori |

ACCOUNTING: Ifroh Hardianti | ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurrohman | ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani | ADMINISTRASI: Nia Aryanti | PEMASARAN: Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2

Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5

Jalan Kebayoran Lama No.12,

Jakarta Selatan

Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN	ADVERTORIAL	IKLAN CILIK/BARIS
Hitam Putih (BW) : Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW) : Rp. 47.000/mm kolom	Rp. 23.000/baris
Warna (FC) : Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC) : Rp. 69.000/mm kolom	- Minimal 3 baris
Hitam Putih Hal. 1 : Rp. 91.000/mm kolom	SOSIAL/KELUARGA	- Maksimum 7 baris
Warna Hal. 1 : Rp. 134.000/mm kolom	Hitam Putih (BW) : Rp. 30.500/mm kolom	
	Warna (FC) : Rp. 54.500/mm kolom	

Pemkab Perangi Hoaks Demi Tingkatkan Imunisasi Anak

PANDEGLANG, BANPOS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bersama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui Participatory Workshop UNDERVAC-ID bertajuk "Komitmen Daerah dan Sinergi Multisektoral dalam Upaya Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Anak" yang digelar di Hotel Horison Pandeglang, Rabu (8/7).

Workshop tersebut bertujuan mengintegrasikan hasil penelitian UNDERVAC-ID ke dalam strategi pemerintah daerah sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program imunisasi.

Kegiatan itu dihadiri Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan, perwakilan peneliti IMERI-FKUI dr. Indah Suci, Peneliti Utama UNDERVAC-ID dr. Ahmad Fuady, Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Banten Kusniawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Eni Yati, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Zamzami, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Asda I Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemkab Pandeglang dan FKUI dalam mendukung peningkatan cakupan imunisasi dasar anak. "Kami menyambut baik kegiatan ini. Saya berharap seluruh peserta tidak hanya mengikuti workshop, tetapi juga

mampu menerapkan hasilnya di lapangan sehingga cakupan imunisasi dasar anak di Kabupaten Pandeglang terus meningkat," katanya.

Doni juga meminta para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan imunisasi, termasuk maraknya penyebaran informasi hoaks. "Workshop ini bukan sekadar penyampaian materi, tetapi menjadi ruang untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai kendala di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Eni Yati mengatakan keberhasilan program imunisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur desa, hingga pemerintah kecamatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membawa anak ke posyandu dan mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. "Kami juga terus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan dalam setiap kegiatan kesehatan masyarakat meski belum di-



Kepala Dinkes Kabupaten Pandeglang, Eni Yati saat acara Participatory Workshop UNDERVAC-ID.

tuangkan dalam bentuk nota kesepahaman," katanya.

Di sisi lain, Peneliti Utama UNDERVAC-ID dr. Ahmad Fuady menjelaskan penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di sejumlah daerah.

La mengatakan hingga 2024 cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional masih berada di bawah target. Selain faktor akses layanan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi juga menjadi salah satu penyebab. "Hasil penelitian ini kami sampaikan

kembali kepada pemerintah daerah sebagai bahan menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah," ujarnya.

Ahmad menjelaskan penelitian lapangan telah dilakukan sejak awal 2025 di enam kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, capaian imunisasi di Pandeglang tergolong baik karena telah melampaui target. Namun, masih ditemukan anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali sehingga tetap berisiko teresang penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin.

Ia mengungkapkan sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan orang tua enggan mengimunisasi anaknya, yakni kekhawatiran terhadap efek samping vaksin, penolakan dari anggota keluarga terutama ayah, serta masih beredarnya informasi hoaks yang menyebut imunisasi tidak halal. "Kami berharap hasil penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap sekaligus mengatasi berbagai hambatan di masyarakat," pungkasnya. (DHE/PAY)

KOTA BADAK



Petugas saat memeriksa terduga pelaku pengedar Upal.

Satreskrim Gagalkan Peredaran Upal

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang menangkap seorang residivis kasus peredaran uang palsu berinisial HD (47), warga Kampung Waas, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan nilai nominal mencapai Rp45,7 juta.

Pelaku ditangkap di Terminal Kadubanen, Kabupaten Pandeglang, Senin (6/7) sekitar pukul 17.30 WIB saat diduga hendak melakukan transaksi. Kanit Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polres Pandeglang Ipda Robet Sangkala mengatakan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran uang palsu di wilayah Kabupaten Pandeglang. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi dan menangkap pelaku. "Kami mengamankan seorang terduga pengedar uang palsu berinisial HD di Terminal Kadubanen. Saat ditangkap, ditemukan uang palsu sebesar Rp45,7 juta yang disimpan di dalam tas pelaku dengan pecahan Rp100 ribu," kata Robet kepada wartawan, Rabu (8/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, HD diketahui merupakan residivis kasus serupa dan baru sekitar 10 hari bebas dari lembaga pemasyarakatan setelah menjalani hukuman atas tindak pidana yang sama. "Di

Pandeglang, pelaku baru kali ini melakukan aksinya. Namun yang bersangkutan merupakan residivis kasus uang palsu dan baru sekitar 10 hari keluar dari lapas," ujarnya.

Polisi juga menduga pelaku merupakan bagian dari jaringan luar daerah. Uang palsu tersebut diperoleh dari seseorang di luar Kabupaten Pandeglang yang kini masih diburu petugas. Menurut Robet, uang palsu diperoleh dengan sistem pembayaran satu berbanding tiga. Untuk mendapatkan uang palsu senilai Rp10 juta, pelaku hanya perlu membayar Rp3 juta menggunakan uang asli. Sementara uang palsu senilai Rp45,7 juta yang disita polisi dibeli pelaku dengan harga sekitar Rp15 juta.

Saat ini, polisi telah menetapkan satu orang lainnya sebagai daftar pencarian orang (DPO) karena diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Robet mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai. Menurutnya, uang palsu yang diamankan memiliki sejumlah perbedaan dengan uang asli, di antaranya tidak memiliki tekstur saat diraba, warna tampak kurang tajam, tanda air (watermark) tidak terlihat jelas, serta sebagian besar memiliki nomor seri yang sama. "Pelaku lainnya masih kami lakukan pengejaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu," katanya. (DHE/PAY)

Bupati Ajukan Empat Program Prioritas ke Komisi II DPR RI



PANDEGLANG, BANPOS - Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengajukan empat program strategis kepada Komisi II DPR RI untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (8/7).

Empat usulan yang diajukan meliputi percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi, pengembangan kawasan industri di sekitar akses jalan tol, optimalisasi lahan

eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk pertanian modern, serta percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Bupati Dewi mengatakan pembangunan Sekolah Terintegrasi menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berprestasi rendah. "Sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 yang kondisi ekonominya berada di bawah rata-rata," katanya.

Selain itu, Dewi mendorong

pembangunan kawasan industri di sekitar akses jalan tol. Menurutnya, keberadaan kawasan industri akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi di Kabupaten Pandeglang. "Keberadaan industri di kawasan exit tol diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Di sektor pertanian, Pemkab Pandeglang mengusulkan pemanfaatan lahan eks HGU sebagai kawasan pertanian modern untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah juga meminta percepatan sertifikasi aset tanah milik daerah guna memberikan kepastian hukum serta memperkuat tertib administrasi aset. "Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar program-program prioritas ini dapat berjalan lebih cepat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci pemerataan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Tensa Nurdiani, menyatakan usulan pemanfaatan lahan eks HGU melalui Bank Tanah harus diawali dengan proses penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). "Prosesnya sama seperti hak lainnya, mulai dari pengukuran hingga penerbitan surat keputusan. Setelah HPL atas nama Bank Tanah terbit, baru dimungkinkan dilakukan kerja sama," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfiar Arse Sadikin mengatakan Komisi II telah mengusulkan Bank Tanah menjadi mitra kerja DPR RI. Menurutnya, jika proses tersebut rampung, pembahasan mengenai lahan eks HGU dan persoalan pertanian akan lebih mudah dilakukan. "Sekarang masih dalam proses. Mudah-mudahan segera terbangun sehingga pembahasan terkait eks HGU dan persoalan pertanian dapat dilakukan dengan lebih mudah," katanya. (DHE/PAY)

Cabuli Santri Dibawah Umur, AS Diamankan Polisi

PANDEGLANG, BANPOS - Diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santri laki-laki, seorang bapak muda di Kabupaten Pandeglang, diamankan Satreskrim Polres Pandeglang. Kasus tersebut saat ini tengah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap kronologi serta motif kejadian tersebut.

Seorang pria berinisial A-S warga Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, ini hanya bisa tertunduk pasrah saat diamankan oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pandeglang, setelah diduga melakukan pencabulan terhadap seorang santri laki-laki berinisial I-M yang masih berusia 14 tahun di-

salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. "Kasus ini terbongkar setelah korban mengadu kepada rekan-rekannya atas aksi bejad pelaku tersebut. Rekan korban yang mendengar hal tersebut melaporkannya kepada kami," kata Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Widiyanto kepada wartawan, Rabu (8/7).

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengakui telah mencabuli korban sebanyak satu kali. "Pelaku mengakui telah mencabuli korban sebanyak satu kali di Ponpes tempat korban menimba ilmu pada 3 Juli 2026 lalu. "Aksi bejad pelaku dilakukan dengan cara meraba bagian



Petugas Unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, saat memeriksa pelaku cabul.

area sensitif korban saat sedang tidur pulas," sambungnya.

Saat ini, lanjut Widiyanto, pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolres Pandeglang. "Pelaku dijerat

pasal 417 tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara," ungkapnya. (DHE/PAY)

IRLAN LARIS
BANTEN POS

Info Iklan:
- 051334404392
- 057505831153

KEHILANGAN

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol B 4228 HL Merk Yamaha Thn 2019 No Ka MH3SG4640KJ058554 No sin G3J8E0111887

Telah Hilang Sertifikat HGB no. 28030119.3.00602, Ds. Jatimulya, Rangkasbitung, L. 3080 M2. An. PT Makmur Multy Mega Mandiri

Telah Hilang BPKB Mobil Suzuki Pick Up, Warna Hitam, No. Mesin: G15AID1094223, No. Rangka: MHYE5L415HJ803622, No. Pol. B 9571 CAH, No. BPKP: N05408218. Tahun 2017, atas nama NURUDIN, Alamat: Baturcep RT.02/03 Baturcep Kota Tangerang

Telah hilang sertifikat sebidang tanah Hak Milik SHM No 71 (28050404100071) dengan Luas 5.590 m2, jalan dumpit raya, kelurahan Gandasari kecamatan jatuwung atas nama Tjapang.

KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 64 ATAS NAMA SAIM SOEANI LUAS 3.827 m2 KELURAHAN KAMAL

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. alamat: Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE
www.banpos.co

EMAIL
iklanbantenpos@gmail.com

TWITTER
@bantenpos

INSTAGRAM
banten_pos

FACEBOOK
facebookbantenpos

YOUTUBE
Banpos Channel

Perjalanan Dinas Dewan Ratusan Juta Diduga Fiktif

Hasil Temuan BPK, Setelah Terima Keterangan Pihak Hotel

TAUFIQ SOLEHJUN/BANTEN POS

LEBAK, BANPOS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati temuan pada penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Lebak. Disebut, temuan hasil audit tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2025. Dan salah satu yang menjadi objek pemeriksaan itu adalah laporan realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

Pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2025, mengalokasikan anggaran sebesar Rp30.346.193.500 untuk kebutuhan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak. Anggaran itu kemudian telah terealisasi sebesar 96,38 persen atau sekitar Rp29.247.734.587,-

Dalam laporan pemeriksaannya, BPK mendapati beberapa temuan dalam penggunaan anggaran tersebut. Temuan itu salah satunya yakni, perjalanan dinas anggota DPRD

tidak disertai surat izin dari Ketua DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja/studi banding.

Kemudian anggota DPRD juga tidak melaporkan hasil kunjungan kerja/studi bandingnya kepada Bupati Lebak selaku kepala daerah. Selain itu dalam laporannya, BPK juga mendapati temuan lain berupa dugaan penyelewengan anggaran penginapan hotel yang nilai mencapai Rp997.339.000,-

Temuan itu diketahui setelah BPK melakukan konfirmasi kepada pihak hotel selaku penyedia penginapan. Dari hasil konfirmasi tersebut didapat permasalahan berupa, ketidaksesuaian harga kamar hotel yang sebenarnya dibawarkan dengan yang ditagihkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Selain karena adanya perbedaan harga sewa yang sebenarnya dibayarkan dengan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban, BPK juga mendapati temuan berupa pihak-pihak yang tidak menginap di hotel namun tetap mengklaim anggaran penginapan.

"Harga kamar hotel yang sebe-

namnya dibayarkan ke pihak hotel lebih rendah dari harga kamar hotel yang dipertanggungjawabkan, dan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel yang ditagihkan dalam laporan pertanggungjawaban minimal senilai Rp997.339.000,-" bunyi dalam laporan tersebut sebagaimana dikutip BANPOS pada Rabu (8/7).

Temuan itu disebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 69 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbup Kabupaten Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD poin 2 huruf f, n dan poin 3 huruf h, m, dan n.

Selain itu BPK juga menilai, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan serta tidak patuhnya pelaksana perjalanan dinas menjadi salah satu penyebab permasalahan itu terjadi.

"Kurang optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas, dan pelaksanaan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas," terangnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak, Budhi Mulyanto, mengaku belum membaca salinan laporan hasil audit BPK. Namun, dia menegaskan, pihaknya telah melakukan pengembalian kelebihan bayar atas hasil temuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Lebak.

"Saya belum baca salinan LHP nya. Temuan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan bayar ke kas daerah," katanya kepada BANPOS pada Rabu (8/7).

Selain itu Budhi juga menyarankan supaya mengkonfirmasi temuan hasil audit tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita



Dalam laporan auditnya, BPK mengungkap kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2025.

Wulandari. Sebab, dia dianggap lebih mengetahui hasil audit BPK.

"Statement lain silahkan konfirmasi ke Bu Ketua. LHP ada di beliau," ucapnya menambahkan.

Setelah mendapatkan konfirmasi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak, BANPOS kemudian menemui Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari untuk meminta penjelasan mengenai hasil temuan tersebut.

Kepada BANPOS, Juwita menjelaskan bahwa sebenarnya anggota legislatif yang melaksanakan perjalanan dinas atau studi banding ke luar kota telah mendapatkan persetujuan darinya. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Lebak sebagai dasar dilaksanakannya kegiatan tersebut.

"Itukan perjalanan dinas anggota

itu sebenarnya sudah ada surat tugasnya dari Ketua DPRD. Itu juga merupakan suatu izin sebenarnya, kan ketika kita mengucurkan seseorang bertanggung mengizinkan orang tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut," terangnya kepada BANPOS saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Lebak pada Rabu (8/7).

Kemudian mengenai temuan klaim biaya penginapan meski pelaksanaan dinas tidak menginap, Juwita menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Namun, besarnya hanya 30 persen dari tarif penginapan yang berlaku di daerah tujuan.

"Kan itu sebenarnya diperbolehkan. Memang dari anggaran yang ada kalau pelaku perjalanan dinas ini tidak menginap berarti yang di-cover hanya 30 persen, maka mungkin kelebihan bayar," terangnya.

Lalu terkait dengan temuan beru-

pa kelebihan selisih pembayaran sewa penginapan, Juwita menerangkan bahwa itu terjadi karena pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan jasa agen travel. Dalam jasa yang ditawarkan oleh agen travel tersebut memiliki perbedaan dengan yang ditawarkan oleh pihak hotel.

"Pakai travel itu kan biasanya banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh travel. Semisal, makan kan berarti tiga hari ya karena kita menginap seharian. Biasanya hotel hanya menyediakan sarapan saja atau mungkin tambahan ekstra bed dan lain-lain," jelasnya.

Namun, Juwita menegaskan, bahwa semua hal yang menjadi temuan audit BPK telah dilakukan pengembalian oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak. "Semua intinya sudah dikembalikan," tandasnya. (TQS/RUS)

MULTATULI

Temuan Proyek Alun-Alun Dinas PUPR Harus Diselesaikan

Ujang Giri: Kontraktor Diminta Bertanggung Jawab

TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp313 juta dalam proyek penataan Alun-alun Rangkasbitung memicu sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Lebak.

Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak mendesak pelaksana proyek atau kontraktor segera bertanggung jawab dan mematuhi rekomendasi auditor negara tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak, Ujang Giri, menegaskan bahwa temuan kelebihan bayar atau ketidaksesuaian volume pekerjaan tersebut harus segera ditindaklanjuti. Ia meminta pihak kontraktor tidak main-main dengan hasil audit yang telah dikeluarkan oleh BPK.

"Terkait adanya temuan BPK itu harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan, salah satunya temuan itu harus dikembalikan ke Kas Daerah," tegasnya pada Rabu (8/7).

Ia menjelaskan, pihaknya selama ini terus melakukan pengawasan melalui rapat koordinasi rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Tak hanya dengan dinas terkait, Komisi IV juga memberikan penekanan khusus kepada Unit Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten Lebak agar lebih selektif dalam menyeleksi kontraktor.

"Kami selalu mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas PUPR yang di dalamnya kami menekankan kepada Dinas PUPR juga Unit Pengadaan Barjas agar ketat dalam merekomendasi penyedia pelaksana proyek agar kualitas pembangunannya bagus," tuturnya.

Kejadian ini, menurut Ujang, menjadi catatan merah sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak.

Ia tidak ingin proyek-proyek yang bersumber dari anggaran publik justru bermasalah di kemudian hari akibat lemahnya pengawasan maupun pengerjaan yang asal-asalan.

Langkah pengawasan ke depan akan lebih diperketat. Politisi Nasdem itu menyarankan agar setiap eksekusi program pembangunan harus melalui kajian yang mendalam, mulai dari tahapan perencanaan hingga teknis pelaksanaan di lapangan.

"Pastinya ini jadi catatan penting agar persoalan ini tidak terulang. Langkah pengawasan kami salah satunya menyarankan agar eksekusi pelaksanaan proyek harus lebih matang lagi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya," pungkasnya.



Mekanisme pengawasan dan verifikasi tersebut

belum optimal sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh BANPOS, proyek penataan Alun-alun Rangkasbitung diketahui menjadi salah satu objek temuan dalam laporan audit BPK.

Dalam temuannya, auditor mengungkap bahwa proses verifikasi dan validasi sebelum pembayaran kepada penyedia dalam proyek penataan tersebut seharusnya dilakukan secara menyeluruh oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan berpedoman pada sejumlah dokumen pengawasan.

Misalnya seperti Berita Acara Mutual Check (MC) 100 persen dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP). Tidak hanya itu pengawasan juga mesti dilakukan dengan memperhatikan kondisi awal pekerjaan melalui MC 0 persen, sertifikat progres bulanan, laporan harian, mingguan, dan bulanan, dokumentasi visual pekerjaan, data pendukung perhitungan volume (back up data), hingga hasil pemeriksaan fisik di lapangan.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, mekanisme pengawasan dan verifikasi tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Dampaknya, masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak, sehingga fungsi pengendalian mutu atas pelaksanaan proyek dinilai belum berjalan secara efektif.

"Mekanisme pengawasan dan verifikasi tersebut belum optimal sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan," dikutip BANPOS dari laporan audit BPK Kantor Perwakilan Banten Senin (6/7) lalu.

Kondisi itu mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian terhadap mutu dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak belum berjalan secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2018 dan PP Nomor 46 Tahun 2025.

Akibat kondisi tersebut, BPK mendapati adanya temuan kelebihan bayar pada pelaksanaan proyek penataan Alun-alun Rangkasbitung sebesar Rp313.121.635,48. (TQS/RUS)

BNN Desak Hasbi-Amir dan Jajarannya Tes Urine

Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Pemerintahan

LEBAK, BANPOS - Badan Narkotika Nasional (BNN) Banten mendesak seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lebak, termasuk Bupati dan Wakilnya, Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah untuk dites urine.

Hal itu bertujuan untuk meminimalisir sedini mungkin penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.

Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Banten, Mita Maharani, Rabu (8/7) tes urine dikalangan pejabat Pemkab Lebak sangat perlu dilakukan, karena tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa dirinya terbebas dari zat adiktif terlarang.

"Semua unsur itu sebenarnya

perlu karena sekarang ini tidak ada yang bisa men-declare bahwa dirinya bersih dari narkotika. Mau kepala daerah, mau kepala desa, semuanya itu perlu dilakukan tes urine," ujarnya.

Mita menerangkan, dampak dari penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya bagi penggunaannya. Selain mempengaruhi kesehatan fisik, ketidakstabilan emosional juga menjadi salah satu efek yang dirasakan oleh pengguna narkotika.

Hal itu jelas akan mempengaruhi kinerja pejabat apabila penyalahgunaan itu terjadi di lingkungan pemerintahan. "Emosionalnya lebih tidak terkontrol dan secara psikologisnya juga pasti fokusnya sudah tidak ke pekerjaan pemerintahan misalnya

kalau pejabat," terangnya.

Masalah itu kemudian kian pelik saat melihat hasil pemetaan BNN terkait wilayah rawan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten. Kata Mita, berdasarkan hasil pemetaan tersebut Kabupaten Lebak masuk dalam kategori wilayah waspada penyalahgunaan narkotika.

Oleh sebab itu ia mendesak Pemkab Lebak untuk rutin melaksanakan tes urine terhadap pejabat di lingkungan pemerintahannya. Kegiatan tersebut sekaligus mengimplementasikan Perda tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN.

"Dengan munculnya perda itu bisa diimplementasikan ke seluruh

OPD dan bisa dijadikan pegangan kepala daerah untuk tidak hanya sekedar perda tapi aksinya," ucapnya.

Dorongan itu kemudian disambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari. Menurutnya, hal itu merupakan upaya positif demi kebaikan bersama.

"Ya karena kalau itu untuk kebaikan bersama kenapa tidak kita lakukan," ucapnya, Rabu (8/7).

Kemudian Juwita juga menyatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan tes urine untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan DPRD Kabupaten Lebak.

"Boleh secepatnya kan di DPRD ada MCU (medical check up)," pungkasnya. (TQS/RUS)

Jalan Poros Penghubung Dua Desa di Bojongmanik Rusak

Musim Hujan Mirip Kubangan Kerbau, Kemarau Bak Sahara

LEBAK, BANPOS - Kondisi jalan rusak di Kecamatan Bojongmanik, Lebak kondisinya rusak parah dan dikeluhkan warga setempat.

Disebutkan, ruas jalan poros sepanjang kurang lebih tiga kilometer yang menghubungkan Desa Bojongmanik dengan Parakan Besi yang dilaporkan hingga kini belum mendapatkan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Rabu 8/07).

Jika musim penghujan, jalan tersebut menjadi licin, becek mirip kubangan Kerbau, dan jika kemarau i bak Gurun Sahara, berdebu merusak penglihatan dan pernafasan.

Pada jalan itu merupakan akses vital yang setiap hari digunakan oleh ratusan warga dari kedua desa.

Warga dua desa mengaku kondisi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan yang berarti.

"Apabila hujan permukaan jalan berubah menjadi lumpur licin yang berbahaya bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Jika kemarau seperti sekarang penuh keputan



Kondisi jalan penghubung dua di Desa, Parakan Besi - Bojongmanik terlihat rusak memprihatinkan. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat.

debu," ungkap salah seorang warga Desa Bojongmanik, Akhmad.

Menurutnya, jalan poros tersebut sangat vital bagi warga dan satu-satunya akses yang bisa dilewati. "Karena kalau lewat jalur lain terlalu susah dan jauh, ini yang paling sering dipakai tapi rusak parah," katanya.

Warga petani Desa Parakan Besi, Sarman mengaku tersiksa dengan kondisi jalan seperti saat ini. Menurutnya, ia selalu lewat jalan itu bila pulang dari sawah atau kebun.

"Saya biasa lewat jalan itu. Ini sudah lama tak pernah ada perbaikan. Saya kalau ngangkut padi atau hasil kebun kadang kepayahan.

Bahkan anak sekolah, seperti anak saya, kalau musim hujan kesulitan lewat karena jalannya penuh lumpur. Saya mohon segera diperbaiki," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab Lebak atau pun Dinas PUPR Lebak terkait jalan itu. (WDO/RUS)

Tinggal Tersisa 30 Persen

Api di TPA Jatiwaringin Masih Menyala

TANGERANG, BANPOS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, menyebut kondisi kebakaran area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk pada Rabu (8/7), tinggal tersisa sekitar 30 persen dari total area yang sebelumnya terbakar mencapai 15 hektare.

"Untuk hari kesembilan, hasil sampai dengan hari kesembilan ini tinggal kurang lebih sekitar 30 persen lagi dari 15 hektare yang terbakar," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik di Tangerang, Rabu (8/7).

Ia menjelaskan, titik api yang tersisa di area kebakaran TPA Jatiwaringin saat ini terus menunjukkan progres yang positif. Dimana, area yang sebelumnya terbakar sekitar 15 hektare dari total luasan tempat pembuangan sampah mencapai 33 hektare.

"Petugas hingga saat ini masih berupaya memadamkan sisa titik api sekaligus mengantisipasi kemunculan api baru di dalam timbunan sampah," terangnya.

Taufik mengungkapkan, kebakaran di TPA memiliki karakteristik berbeda dengan kebakaran lahan gambut. Palsalnya, kata dia, timbunan sampah di TPA Jatiwaringin telah menggunung selama bertahun-tahun.

Kondisi itulah yang membuat kandungan gas metana muncul. Saat cuaca panas, gas tersebut dapat memicu munculnya api secara tiba-tiba dari dalam timbunan

sampah.

Oleh sebab itu, dalam proses pemadamannya, para petugas harus mengurai gunung sampah tersebut dengan alat berat agar lebih mudah memadamkannya.

"Di bagian dalamnya itu mengandung gas metana. Kalau cuaca panas, api bisa muncul sendiri," kata dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan tahapan pemadaman kebakaran di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (7/7) telah mencapai 50 persen.

Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB Brigjen TNI Djohan Darmawan mengatakan dari angka 50 persen pengendalian titik api kebakaran di TPA Jatiwaringin ini juga diiringi dengan tingkat kebersihan area terdampak yang mencapai 70 persen.

Dimana, lanjut dia, hasil pengendalian tersebut merupakan dari optimalisasi kerja keras seluruh unsur dari BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, hingga sektor swasta hingga hari ke delapan pemadaman.

"Mencari solusi itu pasti step by step. Saat ini perkembangannya sudah sangat signifikan. Titik api sudah hampir tidak ada, namun jika terkena angin kencang me-



Sejumlah unit armada pemadam dan alat berat beraktivitas di area kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang.

mang asap masih bisa muncul. Tapi alhamdulillah, pergerakan kita maju pesat," terangnya.

Djohan mengungkapkan, selama operasi kebencanaan kebakaran di area tempat pembuangan sampah yang dinilai memiliki karakteristik dengan menyerupai lahan gambut ini turut menjadi kendala dalam pemadaman petugas gabungan.

Menurutnya, kesulitan petugas dalam mencapai titik api dipenuhi material kompleks seperti plastik dan baling, sehingga pihaknya menerapkan strategi khusus dengan menyemprotkan air dari permukaan, melainkan berkolaborasi dengan alat berat.

Selain itu, metode pendinginan dalam seperti pengangkatan material yang menyimpan panas (geothermal) di bagian dalam terangkat

ke permukaan, petugas darat langsung melakukan penyiraman dan pembasahan (coolingdown).

Kemudian, untuk mempercepat mobilitas, petugas Damkar di sektor utara, selatan, dan tengah disokong oleh puluhan mobil tangki air berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter. Mobil-mobil tangki ini terus keluar masuk menyuap air secara langsung di titik

pemadaman, sehingga armada mobil pemadam utama tidak perlu meninggalkan lokasi untuk melakukan pengisian ulang.

"Sebanyak 500 personel gabungan kini difokuskan untuk menggempur area sektor barat mengikuti arah embusan angin. Selain jalur darat, operasi udara juga terus dioptimalkan," kata dia.(ANT/RUS)



Petugas Dinas PUPR Kota Tangerang melakukan perbaikan jalan rusak.

1.024 Titik Jalan Rusak di Tambal

TANGERANG, BANPOS - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, menyebut perbaikan 1.024 titik jalan rusak selama periode Januari - Juni 2026, menggunakan metode penambalan dengan hotmix hingga paving block.

"Jadi, untuk perbaikan jalan rusak, kita gunakan sistem tambal dengan hotmix maupun paving block. Kita sesuaikan dengan kondisi, namun tetap mengedepankan keselamatan pengendara saat dilintasi," kata Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni dalam keterangan di Tangerang, Rabu (8/7).

Ia menuturkan perbaikan jalan dilakukan petugas dari adanya laporan yang masuk maupun temuan langsung di lokasi. Perbaikan jalan di 1.024 titik atau seluas 34.533,8 meter persegi menjadi bukti konkret upaya pemerintah untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap dalam kondisi prima.

"Kami memastikan upaya perbaikan bisa terus digencarkan hampir setiap hari untuk merespons langsung keluhan masyarakat sekaligus memastikan kondisi infrastruktur jalan di semua wilayah bisa dilalui dengan aman dan nyaman," ujar Taufik.

Sementara itu, beberapa ruas jalan utama yang menjadi fokus perbaikan selama enam bulan terakhir, seperti Jalan Raya M. Toha yang menghubungkan Kota Tangerang-Kabupaten Tangerang via Pasar Kemis, Jalan Raya HOS Cokroaminoto yang menghubungkan Kota Tangerang-Jakarta via Ciledug Raya, dan Jalan Husein Sastranegara yang menjadi jalur akses dari Kota Tang-

erang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sampai saat ini proses perbaikan jalan masih terus berlangsung di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah. Mulai dari jalan kota sampai jalan lingkungan dengan fokus perbaikan berupa penambalan jalan menggunakan hotmix maupun paving block sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan

"Pemkot Tangerang berkomitmen terus meningkatkan kegiatan perbaikan jalan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk telah menentukan ruas jalan prioritas daerah yang akan diperbaiki dalam skala besar," ujarnya.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengapresiasi masyarakat yang terus aktif memberikan masukan, kritik, dan saran sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota Tangerang.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran.

"Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan, saran, dan aduan yang disampaikan masyarakat. Kami memohon pengertian bahwa dalam pelaksanaan program terdapat skala prioritas yang harus didahulukan. Namun, kami pastikan setiap laporan yang masuk terus diproses dan ditindaklanjuti demi kepentingan serta kemakmuran masyarakat Kota Tangerang," ujar Maryono.(ANT/RUS)

Layanan Umrah Tahap Ketiga di Bandara Soetta Dipercepat

TANGERANG, BANPOS - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang,

mengatakan bahwa perpindahan layanan umrah tahap ketiga ke Terminal Khusus 2F dipercepat menjadi mulai 10 Juli 2026.

Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE DJPU 12 Tahun 2026 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor SE-153/BN/2026.

"Evaluasi pelaksanaan tahap pertama menunjukkan proses keberangkatan jamaah melalui Terminal 2F berjalan baik. Seluruh pemangku kepentingan mampu berkolaborasi secara optimal sehingga penyesuaian jadwal tahap berikutnya dapat dilakukan dengan te-

tap mengutamakan kesiapan operasional dan kualitas pelayanan," kata General Manager Bandara Soetta Heru Karyadi di Tangerang, Rabu (8/7).

Ia mengatakan, untuk pelaksanaan tahap pertama perpindahan layanan keberangkatan jamaah umrah rombongan melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah dilaksanakan pada 1 Juli 2026 berjalan dengan lancar. Dalam tahap pertama tersebut jamaah dilayani menggunakan maskapai Loong Air, Hainan Airlines, dan Saudi Arabian Airlines.

"Berdasarkan koordinasi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan tahap ketiga yang semula dijadwalkan pada 15 Juli 2026 dimajukan menjadi 10 Juli 2026," katanya.

Heru bilang, kelancaran pelaksanaan tahap pertama menjadi dasar untuk mempercepat penyelesaian proses perpindahan operasional se-

hingga manfaat layanan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F dapat dirasakan lebih cepat oleh seluruh jemaah umrah.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, tahapan perpindahan operasional layanan keberangkatan jamaah umrah menjadi sebagai berikut, mulai tahap 1 (telah dilaksanakan pada 1 Juli 2026) dengan pesawat Loong Air, Hainan Airlines, dan Saudi Arabian Airlines.

Kemudian, tahap 2 (8 Juli 2026) menggunakan pesawat Scoot dan Turkish Airlines dan tahap 3 (10 Juli 2026) menggunakan pesawat Qatar Airways, Egypt Air, Oman Air, Emirates, dan Etihad Airways.

"Kami terus memperkuat koordinasi bersama regulator, maskapai, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), ground handling, dan seluruh stakeholder agar proses transisi berjalan lancar," terangnya.

Dia menambahkan, percepatan tahapan perpindahan dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan operasional maskapai, penyelenggara layanan keabadian, perusahaan ground handling, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan jamaah umrah.

"Tujuan utamanya adalah menghadirkan layanan yang semakin nyaman, tertib, dan efisien bagi seluruh jamaah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju Tanah Suci," ungkapnya.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penyelenggaraan ibadah umrah yang aman, tertib, nyaman, dan memberikan pengalaman serta memulihkan perjalanan yang lebih baik bagi seluruh jamaah.(ANT/RUS)

Penempatan di Dalam dan Luar Negeri

Bursa Kerja Naker Fest Sediakan 3.174 Lowongan Kerja

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kabupaten Tangerang, menggelar bursa kerja bertajuk Job Fair Naker Fest 2026 yang menyediakan 3.174 lowongan kerja dari sekitar 40 perusahaan.

Bursa kerja yang diselenggarakan sejak Selasa (7/7) menyediakan 243 jabatan dengan total 3.174 lowongan kerja untuk berbagai sektor pekerjaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Kurang lebih 40 pihak pembuka lowongan kerja berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja melalui program Job Fair Naker Fest 2026," kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu (8/7).

Ia mengatakan Naker Fest merupakan bentuk nyata kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan dunia usaha dalam memperluas kesempatan kerja dan

menekan angka pengangguran.

"Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat pencari kerja Kabupaten Tangerang," ucapnya.

Dalam hal ini, Bupati Maesyal menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

"Mudah-mudahan masyarakat segera mendapatkan kepastian pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya," tuturnya.

Menurut dia, semakin banyak masyarakat yang bekerja maka angka pengangguran dan kemiskinan dapat terus ditekan. Selain itu, para pekerja juga akan menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

"Ketika masyarakat sudah bekerja

maka mereka ikut memutar roda perekonomian Kabupaten Tangerang. Secara bertahap masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Rudi Lesmana menjelaskan bahwa Naker Fest 2026 tidak hanya menghadirkan Job Fair, tetapi juga berbagai layanan dan program ketenagakerjaan yang terintegrasi.

Di mana, lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,9 persen.

Untuk itu, Pemkab Tangerang terus berupaya memperluas kesempatan kerja dan mening-

katkan kompetensi masyarakat, salah satunya melalui Naker Fest 2026.

"Naker Fest 2026 dilaksanakan secara hybrid. Pencari kerja dapat bertemu langsung dengan perusahaan, namun proses lamaran dilakukan secara digital melalui aplikasi milik Kabupaten Tangerang," jelasnya.

Rudi menambahkan sebanyak 40 perusahaan dan UPTD Latihan Kerja turut ambil bagian dalam Naker Fest 2026 dengan menyediakan 243 jabatan dengan total 3.174 lowongan kerja untuk berbagai sektor pekerjaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Masyarakat tidak hanya dapat datang langsung ke lokasi kegiatan, tetapi juga bisa mengajukan lamaran secara online melalui aplikasi hingga 12 Juli 2026 pukul 23.00 WIB," kata dia.(ANT/RUS)



DPRD Cilegon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rumah Sakit Umum Daerah guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Komisi IV Dorong Peningkatan Layanan RSUD

CILEGON, BANPOS - Komisi II DPRD Kota Cilegon mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon sekaligus meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD

Kota Cilegon bersama RSUD Kota Cilegon di ruang rapat DPRD, beberapa waktu lalu.

RDP digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Selain mengevaluasi capaian pelayanan, Komisi II juga membahas berbagai kendala yang dihadapi RSUD dalam mening-

katkan mutu layanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PKS, Qoidatul Sitta, mengatakan salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah tindak lanjut atas temuan BPK. "Kami ingin menindaklanjuti hasil temuan BPK. Apa yang menjadi rekomendasi harus segera diselesaikan oleh OPD sehingga tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat semakin baik," ujarnya.

Selain itu, Komisi II meminta RSUD terus meningkatkan kualitas pelayanan seiring pembangunan medical center yang sedang berlangsung. "Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik berdasarkan data yang disampaikan RSUD. Namun, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan, apalagi saat ini sedang dilakukan pembangunan medical center," katanya.

Menurutnya, keberadaan medical center diharapkan dapat menambah kapasitas layanan sekaligus melengkapi fasilitas kesehatan yang tersedia di RSUD Kota Cilegon. Karena itu, Komisi II akan terus melakukan pengawasan terhadap progres pembangunan maupun peningkatan mutu pelayanan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. (CR03/PAY)



Operasi Pasar Murah yang digelar Disperindag di serbu masyarakat.

Stok Operasi Pasar Cepat Habis, Disperindag Ajukan Tambahan Kuota Bulog

CILEGON, BANPOS - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon menggelar operasi pasar murah di Pasar Cikerai, Rabu (8/7), sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Tingginya antusiasme masyarakat membuat sejumlah komoditas yang disediakan habis dalam waktu singkat.

Operasi pasar tersebut melibatkan Perum Bulog, pelaku usaha, dan instansi terkait. Masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, dan komoditas lainnya dengan harga di bawah harga pasar.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Cilegon Achmad mengatakan, operasi pasar merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan maupun terganggunya pasokan. "Melalui operasi pasar ini masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Misalnya minyak goreng yang di pasaran dijual di

atas Rp17 ribu, di sini dijual Rp15 ribu. Mudah-mudahan harga kebutuhan pokok di Kota Cilegon tetap stabil," katanya.

Besarnya minat masyarakat menyebabkan sebagian stok bahan pokok cepat habis. Bahkan, masih ada warga yang belum mendapatkan kebutuhan pokok karena keterbatasan kuota.

Menanggapi hal itu, Disperindag telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah alokasi bahan pokok pada pelaksanaan operasi pasar berikutnya. "Kami sudah mengajukan penambahan kuota kepada Bulog. Mudah-mudahan pekan depan jumlah pasokan bisa ditingkatkan dari 20 dus menjadi 50 dus," ujar Achmad.

Selain menambah kuota, Disperindag juga akan mengevaluasi mekanisme distribusi agar lebih banyak masyarakat dapat menikmati program tersebut.

Lurah Cikerai Cecep Sukarya mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar yang dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan di pasaran. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dengan kuota yang lebih banyak agar seluruh warga dapat terlayani," katanya.

Salah seorang warga, Indah, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar karena dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. "Alhamdulillah harganya lebih murah. Kami berharap stok, terutama minyak goreng, ditambah karena masih banyak warga yang belum kebagian. Tadi juga ada pembeli dari wilayah Kabupaten Serang yang ikut berbelanja," ujarnya.

Disperindag memastikan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bulog untuk menambah kuota operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi daerah, dan mempertahankan daya beli masyarakat. (CR03/PAY)

Pemuda Calon Nahkoda Bangsa

Pemilihan Duta GenRe

CILEGON, BANPOS - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon menggelar Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) 2026 di City Mall Kota Cilegon, Selasa (7/7). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencetak generasi muda yang mampu menjadi agen edukasi bagi remaja di Kota Cilegon.

Pemilihan Duta GenRe diikuti puluhan peserta dari kalangan pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat. Para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang meliputi penilaian wawasan, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman mengenai berbagai isu yang dihadapi remaja, seperti kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pembangunan keluarga.

Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Cilegon, Lendy Delyanto, mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, para peserta Duta GenRe merupakan calon pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan di masa mendatang.

"Generasi saat ini akan mencetak Indonesia Emas, sebagai nahkoda bangsa ini. Beberapa tahun lagi ketika kita pensiun, nanti kalian GenRe yang akan melanjutkan pembangunan di Kota Cilegon ini.

Selain itu, program Duta GenRe juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi remaja, mulai dari pemahaman pendewasaan usia perkawinan, berkarir secara terencana, dan menikah deviasi dengan siklus reproduksi. "Dengan adanya program GenRe sebagai figur remaja sosialisasi secara efektif, karena komunikasi yang terjalin di lakukan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja sehingga menjadi ramah remaja," tutupnya.

Pemilihan Duta GenRe diharapkan tidak hanya melahirkan duta yang berprestasi, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengedukasi remaja di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui peran tersebut, Pemerintah Kota Cilegon menargetkan meningkatnya kesadaran generasi muda untuk merencanakan masa depan secara matang, sehingga dapat menciptakan keluarga yang berkualitas dan mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (CR03/PAY)



DP3AP2KB Cilegon menggelar Pemilihan Duta GenRe 2026 di City Mall Kota Cilegon, Selasa (7/7).



KABEL UTILITAS BERANTAKAN.

Pengendara melintas di samping kabel utilitas yang semrawut di Jalan Veteran, Kota Serang, Rabu (8/7). Selain membahayakan, pemandangan tersebut juga membuat tata Kota terlihat semrawut dan kumuh.



Sambut Sport Center, Pemkot Bangun Enam Lapangan

SERANG, BANPOS – Komite Sepak Bola Mini Indonesia resmi hadir mengembangkan olahraga lokal. Organisasi ini bertekad mencari bibit atlet unggul di Kota Serang.

Sebagai langkah awal, para pengurus baru saja bersilaturahmi dengan walikota. Mereka melaporkan sejumlah capaian luar biasa meski baru saja terbentuk.

“KSMI Kota Serang sudah mendapatkan SK pada 17 Desember 2025 dan dikukuhkan menjadi keluarga besar KONI pada 18 Mei 2026. Alhamdulillah kami juga berhasil menjadi juara pertama Kejurnas PSSI Mini tingkat Provinsi Banten,” kata Ade, Rabu (8/7).

Menyusul prestasi tersebut, pengurus bersiap menggelar sebuah kompetisi bergengsi. Turnamen Piala Walikota dipastikan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, ajang ini akan diselenggarakan berturut-turut pada pertengahan bulan Agustus. Perhelatan tersebut bertujuan memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

“Turnamen Piala Walikota Serang akan digelar pada 15 dan 16 Agustus. Tanggal 15 untuk kategori pelajar tingkat SMP dan tanggal 16 kategori umum dengan target peserta dari organisasi kepemudaan,” ujarnya.

Guna menjaga efektivitas, panitia membatasi jumlah pendftar maksimal enam belas tim. Seluruh laga difokuskan pada lapangan milik Universitas Pamulang Serang.

Di sisi lain, pemerintah kota

membawa kabar gembira bagi pecinta olahraga. Dinas Keperguruan merencanakan pembangunan lapangan mini pada setiap kecamatan.

“Kami menyambut baik rencana Pemerintah Kota Serang menyediakan fasilitas mini soccer di setiap kecamatan. Ini akan memudahkan pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet di Kota Serang,” tuturnya.

Ketersediaan lapangan publik terbukti mampu menekan biaya sewa secara signifikan. Akses masyarakat terhadap sarana olahraga kini menjadi semakin luas.

Tingginya antusiasme warga terlihat dari selalu penuhnya jadwal penyewaan lapangan. Pemerintah daerah sigap merespons dengan wacana pembangunan enam fasilitas sentral.

“Pemkot Serang juga menyiapkan pembangunan fasilitas olahraga di tingkat kecamatan. Enam titik sport center mini akan dibangun pada 2027 di setiap kecamatan,” kata Zeka.

Sebagai tindak lanjut, proyek sarana multifungsi ini dijadwalkan mulai dikerjakan bertahap. Fasilitas baru tersebut dirancang nyaman untuk berbagai aktivitas olahraga.

Pembangunan pusat olahraga ini bertujuan utama mengurangi beban Stadion Maulana Yusuf. Pihak dinas kini berkoordinasi intensif dengan Camat terkait penyediaan lahan.

“Yah, lapangan kecamatan itu lahannya nanti kita minta dari masing-masing kecamatan untuk bisa dapat itu,” ujar Zeka. (CR02/AZM)

Forum dan BKD Silang Pendapat

Tenaga Honorer Makin Terancam

SERANG, BANPOS – Sejumlah tenaga honorer tumpangtindih mempertanyakan validitas hasil seleksi pengangkatan pegawai secara serius. Pemprov dinilai sengaja mengabaikan prioritas yang ditetapkan kementerian terkait secara nasional.

Merespons polemik tersebut, Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat membenarkan fakta bahwa nasib ratusan anggotanya masih terus menggantung. “Iya kang, belum diangkat. Masih kita perjuangkan,” kata Taufik memberikan keterangan resminya kepada BANPOS.

Kondisi tidak pasti ini membuat sebagian besar pekerja terpaksa dialihkan nasibnya melalui skema alih daya. Tragisnya, beberapa pegawai honorer malang tersebut dikabarkan telah kehilangan peker-

jaan utama mereka hari ini. Sebagai tindak lanjut, perwakilan forum kembali mengungkapkan sebuah fakta paling pahit yang sedang dialami tenaga honorer. “Yang masih bekerja masuk outsourcing. Iya, ada juga yang dirumahkan,” ujarnya membenarkan kabar pemecatan sepihak tersebut.

Menanggapi isu ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Ai Dewi Suzana segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Pemerintah daerah tegas membantah adanya tuduhan penelantaran terhadap tenaga honorer kategori khusus tersebut.

Sebaliknya, pihak kepegawaian justru mengklaim seluruh peserta kategori tumpangtindih sudah berhasil diakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah. “Pada prinsipnya ti-

dak ada R3T yang tersisa karena sudah diangkat baik penuh maupun paruh waktu,” katanya menepis tuduhan.

Lebih lanjut, instansi kepegawaian memastikan bahwa proses penataan pegawai telah berjalan sangat lancar sesuai aturan ketat. Pihaknya menjamin keamanan status kerja seluruh tenaga honorer daerah selama mereka tidak melakukan pelanggaran kedisiplinan berat.

Sebagai penutup, ia menegaskan kembali bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak dari instansi kepegawaian manapun. “Sampai saat ini tidak ada yang dirumahkan. Insya Allah tidak, sesuai statement pimpinan. Kecuali yang bermasalah baru ada proses tindakan,” tegasnya. (MYU/AZM)

Pemprov Desak Pemekaran Kabupaten Cilangkahan



SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten kembali mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan secara resmi kepada pemerintah pusat. Agenda strategis pemekaran wilayah selatan tersebut kini menjadi prioritas utama demi pemerataan sistem pembangu-

Wakil Gubernur Banten menyampaikan aspirasi penting masyarakat tersebut saat menyambut langsung kunjungan kerja anggota parlemen senayan. Rombongan spesifik Komisi II DPR RI tersebut sengaja datang untuk mengawasi ketat pelaksanaan berbagai program nasional.

“Kami minta Komisi II bisa me-

nindaklanjuti itu,” ujar Dimiyati.

Pemerintah daerah terus mendesak parlemen agar aktif memperjuangkan pencabutan status moratorium pemekaran daerah dari tangan kementerian. Usulan rencana pembentukan wilayah otonomi daerah yang baru ini ditegaskan sama sekali bukanlah sebuah wacana usang.

Luasnya rentang kendali wilayah administrasi Kabupaten Lebak saat ini terbukti sangat menyulitkan pemerataan distribusi fasilitas birokrasi. Pemekaran ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan mendekatkan jangkauan sistem pelayanan publik bagi seluruh masyarakat pelosok.

“Wilayah Kabupaten Lebak itu sangat luas, sudah layak dilakukan pemekaran agar pelayanan publik semakin dekat,” katanya.

Proses pembentukan wilayah otonomi baru memang selalu membutuhkan alokasi dukungan anggaran fiskal yang sangat besar jumlahnya. Meskipun demikian, stabilitas kapasitas keuangan pemerintahan Provinsi Banten pada tahun ini dinilai sudah sangat memadai target.

Keberadaan berbagai ragam kekayaan alam melimpah di kawasan selatan menjadi modal kuat kemandirian ekonomi daerah otonom. Sektor pengelolaan perkebunan dan pariwisata wilayah Cilangkahan diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan asli daerah secara maksimal.

“Apalagi kalau kita melihat potensinya, daerah Cilangkahan memiliki sumber daya alam yang sangat potensial,” tambahnya.

Selain membahas isu pemekaran wilayah, pemerintah turut memaparkan tingginya realisasi capaian berbagai program prioritas berskala nasional. Sektor masif perluasan akses pendidikan dan kesehatan gratis kini sukses menjangkau ratusan ribu keluarga kurang mampu.

Perwakilan pihak dewan memberikan apresiasi setinggi mungkin terhadap kinerja cemerlang seluruh jajaran aparat daerah Provinsi Banten. Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan lembaganya siap mengawal seluruh mulia pemekaran kawasan Kabupaten Cilangkahan.

“Intinya kami mendukung itu,” tandas Zulfikar menanggapi seluruh laporan gubernur. (MPD/AZM)

Pemkot Buka Peluang Investor Garap SCC

SERANG, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membuka peluang bagi investor untuk terlibat dalam pembangunan Serang Convention Center (SCC) yang akan dikembangkan di kawasan Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, tepatnya di seberang Banten International Stadium (BIS). Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan konsep pembangunan SCC secara bertahap dengan mengedepankan kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Menurutnya, arahan Walikota Serang agar pembangunan tidak hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah menjadi dasar pemerintah membuka ruang investasi dalam pengembangan kawasan tersebut.

"Kami tidak ingin pembangunan SCC hanya bergantung pada APBD. Yang terpenting pemerintah menyiapkan perencanaan yang matang. Ketika ada investor yang ingin masuk, kami sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Iwan, Rabu (8/7).

Ia menjelaskan, hingga saat ini memang belum ada investor yang secara resmi menyatakan minat. Namun, sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang dinilai memiliki potensi besar untuk menarik investasi, terutama karena lokasi SCC berada di kawasan strategis yang terintegrasi dengan Banten International Stadium (BIS).

Selain peluang dari sektor swasta, Pemkot Serang juga membuka kemungkinan ada-

nya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah pusat apabila kawasan tersebut nantinya menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan berskala regional maupun nasional.

Menurut Iwan, SCC tidak hanya dirancang sebagai gedung konvensi. Pemerintah menyiapkan kawasan terpadu yang terdiri atas convention hall, plaza terbuka, lapangan upacara, hingga hotel sebagai fasilitas penunjang penyelenggaraan berbagai kegiatan.

Konsep tersebut disiapkan agar SCC mampu menjadi pusat penyelenggaraan rapat, seminar, pameran, konser musik, kegiatan pemerintahan, hingga agenda ekonomi kreatif yang selama ini masih terbatas di Kota Serang.

"Pusat kegiatan nantinya tidak hanya berada di tengah kota, tetapi juga berkembang di kawasan SCC sehingga muncul pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan SCC diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan pekerjaan, serta menciptakan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan usahanya.

Meski membuka peluang investasi, Iwan menegaskan seluruh pembangunan tetap akan dilakukan secara selektif. Pemerintah tidak ingin membangun fasilitas yang sulit dikelola atau justru membebani biaya operasional tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin setiap fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat, produktif, dan mampu menjadi aset yang menghasilkan bagi daerah," katanya. (CR02/AZM)



Tahanan Tewas di Penjara Polisi Pastikan Tanpa Kekerasan

SERANG, BANPOS - Kasus meninggalnya seorang tahanan secara mendadak mengejutkan jajaran Kepolisian Resor Serang hari ini. Tersangka kasus pencurian berinisial AN ditemukan tewas saat mendadak di dalam ruang tahanan.

Menyikapi insiden tidak terduga tersebut, polisi langsung bergerak cepat mengevakuasi jenazah korban. Keluarga korban secara tegas menolak rencana pelaksanaan proses autopsi jenazah almarhum.

"Kami sudah menawarkan autopsi agar penyebab kematian dapat dipastikan secara menyeluruh. Namun pihak keluarga menolak dan memilih segera memulangkan jenazah," ujarnya kepada BAN-

POS, Rabu (8/7).

Sebagai tindak lanjut, penegak hukum segera memulangkan jenazah sesuai dengan permintaan keluarga. Korban langsung dibawa menuju kampung halamannya di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Sebelum kejadian nahas ini, korban dilaporkan sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun drastis. Petugas jaga ruang tahanan saat itu langsung merespons keluhan sakit dengan cepat.

"Setelah diperiksa, almarhum diberikan obat-obatan sesuai hasil pemeriksaan medis," katanya. Menindaklanjuti keluhan ber-

ulang tersebut, korban dilarikan secara darurat menuju klinik terdekat. Upaya tindakan medis tersebut sayangnya gagal menyelamatkan nyawa sang tahanan pencurian.

Berdasarkan pemeriksaan darurat, tim dokter menyatakan korban wafat seketika akibat serangan jantung mendadak. Jenazah kemudian langsung dibawa menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk diperiksa forensik.

"Dari hasil visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tim medis menemukan indikasi klinis yang mengarah pada serangan jantung, di antaranya pecah pembuluh darah di mata serta keuangannya cairan dari alat kelamin,"

jelasnya.

Merespons hasil visum tersebut, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur penganiayaan. Kematian korban murni disebabkan oleh komplikasi riwayat penyakit jantung akut.

Sebagai bentuk pelayanan maksimal, kepolisian turut mengawal ketat proses pemulangan jenazah. Mereka memastikan jenazah tiba dengan aman di tanah kelahiran sang mendiang.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Semoga diberikan ketabahan dan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," tandas Andi. (MYU/AZM)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SERANG



Kawal Pendapatan Daerah

DPRD Awasi Kualitas Layanan

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Drajat Prawiranegara kini menghadapi tantangan target pendapatan yang sangat ambisius. Proyeksi keuangan strategis tersebut ditetapkan mencapai angka fantastis sekitar dua ratus sepuluh miliar rupiah tahun ini.

Menyikapi wacana target masif tersebut, dewan menuntut adanya transformasi kualitas layanan medis yang

sangat nyata. "Setiap bulan ataupun setiap termin kita melakukan evaluasi," ujar Ketua Komisi III Supiyanto secara tegas.

Peningkatan capaian finansial secara signifikan mutlak berbanding lurus dengan perbaikan mutu fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pengawasan sangat ketat terhadap sistem pengelolaan anggaran instansi menjadi agenda wajib setiap awal bulan.

Wakil rakyat daerah berkomitmen

penuh memastikan target kinerja lapangan berjalan selaras dengan rencana strategis pemerintah. "Salah satu tugas pokok DPRD adalah melakukan pengawasan, khususnya Komisi III yang menjadi mitra rumah sakit," tambahnya.

Kucuran dana hasil pendapatan skema badan layanan umum ini sama sekali bukan ladang keuntungan bagi pemerintah. Seluruh perolehan rupiah wajib diputar kembali secara transparan untuk membiayai operasional medis di tempat tersebut.

Pengelolaan kas independen sejatinya menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan standarisasi fasilitas kesehatan publik daerah. "Seluruh pendapatan yang diperoleh melalui skema BLUD tidak menjadi keuntungan pemerintah daerah," tegas Supiyanto kepada media.

Selain membiayai operasional rutin harian, dana segar ini berfungsi strategis mempercepat realisasi pengadaan berbagai kebutuhan pelayanan. Setiap pasien berhak penuh menerima jaminan perawatan medis terbaik sesuai standar regulasi kesehatan nasional.

Komitmen peningkatan kualitas mutu pelayanan ini menjadi sebuah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manajemen. "Dana tersebut sepenuhnya digunakan kembali untuk menunjang operasional rumah sakit, mulai dari

pelayanan medis, pengadaan kebutuhan pelayanan, hingga peningkatan fasilitas kesehatan," jelasnya.

Fakta ironisnya, anggota dewan masih sering menemukan kendala krusial berupa penumpukan pasien gawat darurat harian. Kapasitas ruangan rawat inap saat ini dinilai terbukti belum mampu menampung lonjakan arus pasien.

Kondisi darurat ini tentu saja sangat mengganggu tingkat kenyamanan masyarakat yang sedang berjuang mencari kesembuhan. "Kadang pasien menumpuk di IGD karena ruang kamar yang tersedia masih terbatas," ungkap Supiyanto sangat prihatin.

Guna mengurai masalah kronis

tersebut, proyek pembangunan gedung instalasi bedah sentral modern resmi mulai diinisiasi pemerintah. Fasilitas kesehatan senilai dua puluh enam miliar rupiah ini dibiayai penuh melalui alokasi dana Kementerian pusat.

Gedung baru diproyeksikan beroperasi optimal untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus mendorong pendapatan asli daerah maksimal. "Mulai dari Bapenda, Diskoumperindag, BPKAD, Perumda Tirta Albantani dan BPR Serang, kita akan lakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk mengawal realisasi PAD di 2026 sehingga target yang dicantangkan bisa tercapai," kata Supiyanto. (ADV)



Pelecehan Sesama Jenis...

Sambungan dari Halaman 1

sesama jenis saat bekerja pada malam hingga dini hari.

Fenomena tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin. Para pengemudi mengaku kasus serupa bukan hanya dialami satu atau dua orang, melainkan telah menjadi pembicaraan di kalangan komunitas ojol. Namun, sebagian besar korban memilih bungkam karena malu dan khawatir mendapat stigma.

Salah seorang pengemudi menceritakan pengalamannya saat menerima pesan pada dini hari. Setelah menghubungi pelanggan melalui aplikasi, ia justru menerima pesan berisi tawaran uang dengan syarat bersedia melakukan hubungan seksual. Merasa terkejut dan tidak aman, pengemudi tersebut memilih membatalkan pesanan dan meninggalkan lokasi.

Pengemudi lain mengaku pernah mengantar seorang penumpang yang belakangan diketahui merupakan transpuan. Selama perjalanan, penumpang tersebut beberapa kali merapatkan tubuh ke arah pengemudi hingga membuatnya tidak nyaman. Setibanya di lokasi tujuan, korban kembali diajak ikut bersama penumpang tersebut. "Kalau saya yang dapat, langsung saya turunkan," ujar salah seorang pengemudi.

Jual Seragam...

Sambungan dari Halaman 1

diterima melalui SPMB. Tidak ada lagi pungutan apa pun," katanya di Gedung Setda Kota Serang, Rabu (8/7).

Selain pungutan, Dindikbud juga melarang sekolah menggelar rapat komite yang berujung pada permintaan iuran kepada orang tua murid.

Ahmad menjelaskan, sekolah juga tidak diperbolehkan menjual maupun mengoordinasikan pembelian seragam siswa baru. Pemerintah Kota Serang hanya menyediakan bantuan seragam merah putih bagi siswa SD dan seragam biru putih bagi siswa SMP, sedangkan seragam pramuka, batik, dan olahraga dibeli secara mandiri oleh orang tua. "Kami melarang sekolah melakukan pungutan atau terlibat menjual seragam, apalagi memaksa orang tua membeli di sekolah. Orang tua bebas membeli seragam di mana saja," ujarnya.

Meski koperasi sekolah masih diperbolehkan menyediakan seragam, pihak sekolah tidak boleh mengumpulkan uang atau mewajibkan wali murid membeli di satu tempat. "Yang dilarang adalah mengoordinasikan pembelian dengan mengumpulkan uang dari seluruh wali murid. Orang tua harus diberi kebebasan menentukan tempat membeli seragam," katanya.

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

Kasus suap perizinan yang menjerat kepala daerah di wilayah Banten menjadi bukti nyata krisis etika saat ini. Kenyataan pahit ini mencoreng wajah demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas hasrat pribadi.

Publik kian muak melihat perilaku pejabat yang abai terhadap etika karena terseret pusaran kehidupan pribadi atau wanita. Fenomena ini membuktikan bahwa moralitas pemimpin sering kali runtuh saat dihadapkan pada godaan duniawi yang sangat kuat.

Transisi menuju Banten yang lebih baik memerlukan sosok pemimpin yang memiliki integritas tanpa kompromi sedikit pun. Godaan harta, tahta, dan wanita sering kali merusak fondasi moral yang dibangun dengan kerja keras kolektif.

Hegemoni kekuasaan ini sering kali melanggengkan praktik kolusi yang merugikan pembangunan daerah secara sistematis dan sangat masif. Keterlibatan orang penting dalam pusaran kasus korupsi lahan menjadi potret buram integritas birokrasi di wilayah Banten. Rakyat menuntut komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas semua skandal korupsi tersebut tanpa kecuali. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas dalam menangani para pelanggar etika pemimpin.

Membangun etika integritas memerlukan keberanian kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersuara sangat lantang setiap hari. Pengawasan publik yang tajam menjadi kunci utama mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para elit di pro-

Menurut pengakuan sejumlah pengemudi, perlakuan serupa lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari. Bahkan, ada korban yang mengaku mengalami trauma sehingga membatasi jam operasional atau lebih memilih menerima pesanan makanan dibandingkan mengangkut penumpang.

Ketua LPLPP Prima, Faridhotul Jannah, menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan seksual. Menurutnya, korban laki-laki sering kali tidak menyadari potensi ancaman karena pelaku berasal dari sesama jenis. "Fenomena kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan jenis kelamin yang sama menghadirkan tantangan tersendiri. Dalam banyak situasi, kewaspadaan korban menjadi lebih rendah karena mereka tidak menduga ancaman datang dari sesama jenis," ujarnya.

Ia mengatakan stigma bahwa laki-laki harus selalu kuat justru membuat banyak korban memilih diam karena takut dipermalukan atau tidak dipercaya. Karena itu, Faridhotul meminta perusahaan penyedia layanan transportasi daring menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi seluruh mitra pengemudi, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum, edukasi pencegahan kekerasan seksual, serta pemberian

Menurut Ahmad, surat edaran tersebut diterbitkan setelah Dindikbud menerima informasi adanya rapat komite di salah satu sekolah yang membahas pengadaan seragam dengan nominal tertentu. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat sehingga perlu dicegah.

Ia menegaskan, sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencopotan kepala sekolah apabila tetap mengabaikan ketentuan. "Kalau masih melanggar akan kami beri peringatan. Jika kepala sekolah tetap bersikeras, bisa kami copot dari jabatannya," tegasnya.

Walikota Serang Budi Rustandi turut menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh menjual seragam maupun melakukan pungutan kepada siswa baru. Menurutnya, kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah akan dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan jenis seragam lainnya dapat dibeli sendiri oleh orang tua. "Yang disiapkan pemerintah akan kami siapkan. Selebihnya masyarakat membeli sendiri agar tidak muncul dugaan permainan dalam pengadaan seragam," katanya.

Budi juga memastikan tidak boleh ada pungutan terhadap siswa baru yang telah diterima melalui proses SPMB. "Tidak boleh ada pungutan," tegasnya.(CR02)

vensi ini.

Tanpa kontrol sosial yang kuat, kekuasaan akan terus menggoda orang penting untuk berbuat curang setiap waktu tertentu. Transparansi anggaran harus menjadi harga mati bagi setiap pemimpin agar tidak ada ruang bagi tindakan koruptif.

Integritas bukan hanya soal tidak mencuri, tetapi tentang keberanian menyuarakan kebenaran di depan semua pihak secara konsisten. Integritas adalah cermin jati diri seorang pemimpin saat tidak ada orang yang melihat perbuatannya secara langsung.

Perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang bersih menuntut pengorbanan besar dari sosok pemimpin yang sedang berkuasa. Integritas yang tangguh akan menjadi benteng utama dalam menghadapi badai godaan yang datang dari berbagai arah samping.

Kita mendambakan kehadiran pemimpin yang mampu membawa perubahan substansial bagi kesejahteraan rakyat Banten secara menyeluruh di masa depan. Masa depan Banten yang lebih bermartabat tentu bergantung pada integritas pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum mendatang.

Seluruh elemen masyarakat harus terus mengawal proses demokrasi ini demi melahirkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan jujur. Hanya dengan integritas yang terjaga, Banten dapat keluar dari jeratan praktik korupsi yang merusak sendi kehidupan berbangsa.

Apakah menurut Anda sanksi sosial yang lebih tegas mampu menjadi instrumen efektif dalam menekan angka pelanggaran etika pemimpin di Banten?*

sanksi kepada pelanggan yang terbukti melakukan pelecehan.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan layanan perlindungan korban dapat diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Di sisi lain, penelusuran BAN-POS menemukan aktivitas pencarian pasangan sesama jenis semakin terbuka di media sosial. Sejumlah grup privat di Facebook menggunakan kata "gay" disertai nama kabupaten maupun kota di

Tahanan Polres...

Sambungan dari Halaman 1

putusan yang masih memerlukan penafsiran lebih mendalam, terutama mengenai objek sengketa yang dinyatakan menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten. "Kami masih mengkaji secara detail. Kami ingin memastikan bagian mana yang diputuskan menjadi hak Pemprov agar langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya.

Bahkan, Pemprov berencana berkonsultasi dengan Mahkamah Agung untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai amar putusan tersebut. "Putusan pengadilan tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Karena itu kami berencana berkonsultasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya," katanya.

Dimiyati menegaskan, apabila nantinya Situ Rancagede berada di bawah pengelolaan Pemprov Banten, pemerintah akan mengedepankan asas keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat maupun pihak lain yang selama ini memiliki hubungan kerja sama di kawasan

Provinsi Banten. Anggotanya berasal dari berbagai daerah dan berinteraksi secara tertutup.

Berdasarkan penelusuran BAN-POS, sebagian unggahan dalam grup tersebut berisi ajakan mencari pasangan sesama jenis untuk pertemuan yang bersifat sementara dengan kesepakatan menjaga identitas masing-masing. Beberapa akun juga mengunggah foto pribadi untuk menarik perhatian anggota lain.

Namun demikian, BANPOS

tersebut. "Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah harus tetap mendapatkan kepastian dan keadilan," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Furkon menyatakan, berdasarkan putusan kasasi, Situ Rancagede secara hukum telah menjadi aset Pemerintah Provinsi Banten.

Meski demikian, kata Furkon, pemerintah tetap berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya, termasuk menyusun skema penataan dan pemanfaatan aset tersebut. "Kami sedang mengkaji langkah-langkah yang akan dilakukan. Dinas teknis juga sudah kami minta menyiapkan kajian dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara," ujarnya.

Menurut Furkon, kajian tersebut diharapkan menjadi dasar dalam mempercepat penataan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) Situ Rancagede agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(MPD/PAY)

tidak menemukan bukti yang menghubungkan aktivitas dalam grup media sosial tersebut dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami para pengemudi ojol. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai pengawasan terhadap aktivitas grup-grup tersebut.

Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Dalam regulasi tersebut, penyebaran budaya LGBTQ dimasukkan sebagai salah satu ancaman nonmilitar pada dimensi sosial dan budaya yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan nasional.

Selain itu, peraturan tersebut juga memuat berbagai ancaman nonmilitar lainnya, seperti radikalisme, serangan siber, judi online, perdagangan orang, hingga perubahan iklim.(MYU/PAY)



Wakil Gubernur Banten A Dimiyati Natakusumah saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Banten Rabu, (8/7).



NYARIS PICU KEBAKARAN BESAR DI NEGLASARI

Tumpukan sampah di Jalan Marsekal Suryadarma, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, terbakar pada Selasa (7/7) tengah malam. Kebakaran yang diduga dipicu aksi pembakaran sampah oleh orang tak bertanggung jawab itu sempat membuat warga sekitar panik karena api perlahan membesar dan berpotensi merembet ke area di sekitarnya. Beruntung, peristiwa tersebut segera diketahui warga yang saat itu tengah mengikuti kegiatan pengajian tidak jauh dari lokasi. Mereka langsung bergotong royong memadamkan kobaran api sebelum menjalar lebih luas.

Bappeda Banten...

Sambungan dari Halaman 1

Informasi yang dihimpun BAN-POS dari sejumlah sumber menyebutkan adanya dugaan permintaan persentase dari anggaran kegiatan dengan besaran bervariasi, bahkan disebut mencapai 15 persen. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Salah seorang sumber BANPOS yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku dugaan permintaan persentase itu berlaku pada hampir seluruh kegiatan di lingkungan Bappeda. "Pak Babar

mematok 15 persen dari kegiatan di Bappeda," ujar sumber tersebut, Rabu (8/7).

Sumber yang sama juga mengklaim pola serupa pernah diterapkan saat Babar Suharso menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Meski demikian, klaim tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Berdasarkan penelusuran BAN-POS pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2026, Bappeda

Provinsi Banten tercatat memiliki 87 paket pengadaan. Namun, data tersebut hanya menunjukkan daftar paket pengadaan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya dugaan permintaan potongan anggaran.

Dikonfirmasi mengenai tuduhan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso membantah seluruh informasi yang beredar. Ia menegaskan tidak pernah meminta potongan anggaran dari kegiatan apa pun. "Hoaks itu, tidak benar. Proyek yang mana? Hoaks," kata Babar usai menghadiri kegiatan kunjungan

kerja Komisi II DPR RI di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (8/7).

Babar juga menegaskan selama menjabat di Bappeda maupun organisasi perangkat daerah sebelumnya dirinya tidak pernah melakukan praktik sebagaimana yang dituduhkan. "Sejak kapan saya begitu? Dari dulu tidak pernah ada," tegasnya.

Menurut Babar, pengelolaan anggaran di Bappeda telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan didukung sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). "Semuanya sudah berjalan dengan baik," ujarnya.(MPD/PAY)

Karang Bokor...

Sambungan dari Halaman 1

satu destinasi wisata alam di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Berada di kawasan Banten Selatan, tempat ini menawarkan pengalaman menikmati laut dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari bibir pantai, melainkan dari atas tebing karang yang berdiri kokoh menghadap langsung ke Samudra Hindia.

Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, Karang Bokor menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di destinasi wisata lain. Tidak ada deretan bangunan tinggi maupun keramaian kendaraan. Yang terdengar hanya suara ombak, semilir angin, dan sesekali kicauan burung yang melintas di langit pesisir.

Karakter inilah yang membuat Karang Bokor perlahan menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan yang ingin melepas penat. Banyak

pengunjung datang sekadar duduk di tepian tebing, menikmati pemandangan laut lepas sambil membiarkan angin pantai menghapus rasa lelah setelah rutinitas sehari-hari.

Menjelang sore, wajah Karang Bokor berubah semakin memersona. Langit perlahan berwarna jingga, sementara matahari mulai turun menuju garis cakrawala. Cahaya keemasan memantul di permukaan laut, menciptakan panorama senja yang menjadi incaran para pemburu fotografi.

Momen itulah yang paling ditunggu para wisatawan. Tak sedikit yang sengaja datang pada sore hari hanya untuk mengabadikan siluet matahari tenggelam dengan latar tebing karang dan lautan lepas.

Bagi Chandra Hidayatullah, wisatawan asal Kabupaten Lebak, kunjungan pertamanya ke Karang Bokor meninggalkan kesan mendalam. Menurutnya, panorama

yang disuguhkan memiliki karakter berbeda dibandingkan kawasan pantai lain di Provinsi Banten. "Pemandangannya luar biasa. Tebing karangnya tinggi dan langsung menghadap laut lepas, jadi ketika berdiri di atasnya kita bisa melihat hamparan laut yang sangat luas," ujarnya.

Ia menilai keindahan alam Karang Bokor layak menjadi salah satu tujuan wisata, terutama saat musim liburan. Selain panorama yang memanjakan mata, suasana kawasan tersebut masih relatif tenang sehingga pengunjung dapat menikmati alam tanpa terganggu keramaian.

Menurut Chandra, hampir setiap sudut Karang Bokor memiliki daya tarik untuk diabadikan melalui kamera. Area tebing yang menghadap langsung ke laut menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berburu foto. "Kalau datang saat sore hari, pemandangan

matahari terbenamnya sangat indah. Banyak wisatawan yang datang untuk berburu foto sunset," katanya.

Keindahan Karang Bokor menjadi bukti bahwa Banten Selatan tidak hanya memiliki pantai-pantai eksotis, tetapi juga lanskap tebing pesisir yang menyuguhkan panorama berbeda.

Perpaduan tebing karang, lautan lepas, dan langit senja menghadirkan pengalaman wisata yang sulit dilupakan.

Bagi siapa pun yang ingin sejenak menjauh dari keramaian kota, Karang Bokor menawarkan ruang untuk berhenti, menikmati semilir angin, mendengar irama ombak, dan menyaksikan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Kesederhanaan alam itulah yang menjadikan Karang Bokor memiliki pesona yang terus memanggil wisatawan untuk kembali.(PAY)

Target Produksi Vaksin Mandiri 2029

JAKARTA, BANPOS - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pengembangan riset 11 antigen vaksin dalam negeri. Langkah ini bertujuan agar 15 jenis vaksin bisa diproduksi secara mandiri sebelum 2029.

Sebanyak 11 dari 15 vaksin tersebut masih diproduksi melalui proses perakitan sederhana saja.

Selama ini industri dalam

negeri hanya mengemas bahan baku dari luar negeri ke botol. Praktik ini dinilai tidak cukup untuk membangun kemandirian teknologi kesehatan bagi bangsa Indonesia.

"Obatnya kita impor dari China dan India. Setelah itu, kita menuangkan ke botol dan selesai," katanya.

Pemerintah berencana menguasai teknologi *viral factor* dan mRNA untuk mendukung kemandirian riset tersebut. Penguasaan teknologi ini krusial agar seluruh proses produksi vaksin bisa dilakukan sepenuhnya di Indonesia.

Kemandirian vaksin ditargetkan tercapai sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029 mendatang. Menkes mendorong sinergi

antara kementerian, lembaga riset, dan industri untuk melakukan transfer teknologi.

"Hal bagus dari ini, bukan cuma melakukan riset dan pengembangan. Anda buat juga produk-produknya. Dan ada orang di luar sana yang siap beli dan menggelontorkan uang untuk membeli produk-produk Anda. Jadi bagus kan? Itu situasi yang ideal," kata Budi.

Hasil riset ilmiah harus mampu diimplementasikan menjadi produk nyata bagi masyarakat luas. Inovasi tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen penelitian atau tulisan di atas kertas.

Kebanggaan ilmuwan terletak pada kemampuan produk mereka dalam menyelamatkan nyawa masyarakat banyak. Pemerintah memastikan seluruh regulasi akan dipercepat guna mendukung target produksi massal vaksin nasional.

"Jadi saya tunggu sebelum 2031, atau sebelum 2030, sebelum jabatan saya selesai, sehingga perusahaan pembuat vaksin bisa memproduksi 15 antigen ini. Dan disetujui Pak (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) Taruna Ikrar," kata Budi.

Keberhasilan proyek ini akan menempatkan Indonesia sebagai negara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan vaksin. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memacu percepatan inovasi di bidang bioteknologi. (ANT/AZM)



Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo

Sinergi Hukum Adat Perkuat Pembangunan Papua

JAKARTA, BANPOS - Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya sinergi hukum negara dan adat. Langkah ini krusial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan di Papua.

"FGD ini tidak hanya dimaknai sebagai forum diskusi teknis penyusunan regulasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menyinergikan hukum negara, hukum adat, kearifan lokal, dan riset ilmiah guna mewujudkan pembangunan Papua Barat Daya yang maju, adil, berdaya saing, dan bermartabat," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kini sedang menginisiasi penyusunan naskah akademik Raperda. Regulasi ini dirancang untuk melindungi hak masyarakat hukum adat secara komprehensif.

Penyusunan aturan tersebut menjadi langkah strategis demi menghadirkan kebijakan daerah yang berkeadilan. Regulasi ini harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

Pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan administratif semata. Keberhasilan pembangunan harus bertumpu pada penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya masyarakat.

Yusharto menjelaskan penyusunan Raperda Masyarakat Hukum Adat harus menjadi instrumen kebijakan yang kuat. Regulasi itu wajib menjamin pengakuan hak masyarakat adat secara utuh dan menyeluruh.

Regulasi tersebut tidak boleh berhenti pada aspek normatif di atas kertas saja. Aturan harus memberikan kepastian perlindungan hak, wilayah adat, serta penguatan kelembagaan lokal.

Yusharto menambahkan

Papua Barat Daya memiliki modal pembangunan daerah yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bahasan negara dan adat. Langkah ini krusial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan di Papua.

"Kami berkomitmen mendorong setiap kebijakan daerah disusun secara berkualitas, berbasis bukti, selaras dengan regulasi, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah," tuturnya.

Potensi unggulan daerah mencakup sektor kelautan, perikanan, serta sektor pariwisata berkelanjutan. Namun, tantangan tingkat kemiskinan sebesar 17,95 persen masih memerlukan perhatian khusus bersama.

Pemerintah daerah perlu memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat asli Papua. Perlindungan hukum adat harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan tersebut.

Yusharto memberikan tiga rekomendasi strategis bagi penyusunan naskah akademik Raperda tersebut. Masyarakat adat harus menjadi subjek utama dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan daerah.

Pemerintah juga harus membangun basis data masyarakat hukum adat yang valid. Langkah ini berfungsi sebagai fondasi kebijakan berbasis bukti yang akurat bagi pemerintah.

Harmonisasi regulasi sektoral perlu dipastikan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kepastian hukum bagi investasi harus dibarengi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang dialogis.

Sinergi antarkementerian dan akademisi sangat diperlukan untuk menyelesaikan agenda pembangunan ini. Kolaborasi inklusif akan mempercepat terwujudnya Papua yang produktif dan lebih bermartabat. (ANT/AZM)



Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan

Sekolah Garuda Jadi Transformasi Pendidikan Nasional

JAKARTA, BANPOS - Pemerintah segera mengoperasikan empat Sekolah Garuda pada 20 Juli 2026 mendatang. Langkah ini menjadi bagian penting transformasi pendidikan nasional demi mencetak talenta unggul.

"Talenta ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak ada di mana-mana," ujar Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie.

Program ini diinisiasi sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto. Sekolah berasma ini

fokus mencetak talenta terbaik di bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika.

Stella meyakini talenta terbaik Indonesia tersebar hingga ke pelosok negeri yang jauh. Kesempatan pendidikan unggul harus tersedia bagi seluruh siswa dengan kemampuan akademik terbaik.

"Yang dituju adalah mereka yang paling pintar dan paling berprestasi," katanya.

Pemerintah mengembangkan Sekolah Garuda melalui skema sekolah baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Lokasinya mencakup Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe Selatan, serta Bulungan di Kalimantan Utara.

"Kami tidak mengganti gedung dan tidak mengganti guru. Yang kami perbaiki adalah sistemnya," ujarnya.

Skema kedua adalah Sekolah Garuda Transformasi dengan memperkuat sistem pembelajaran serta tata kelola sekolah. Fokus utamanya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui seleksi ketat dan pemberian tunjangan khusus.

"Sekolah tidak akan berhasil tanpa guru yang berkualitas," terang Stella.

Kehadiran sekolah ini turut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Pembangunan fisik sekolah melibatkan sekitar 1.500 pekerja lokal guna mempercepat penyelesaian proyek tersebut.

"Dengan tenaga kerja yang ada, saya yakin pembangunan

bisa selesai," ujar Irham.

Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo berharap program ini memicu daerah memperkuat pembinaan siswa sejak dini. Hal ini penting agar kualitas pendidikan lokal mampu bersaing dengan wilayah lain.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan kita masih tertinggal," kata Irham.

Pihak sekolah menegaskan tetap menggunakan kurikulum nasional dengan penguatan akademik dan karakter siswa. Pendekatan ini diharapkan mampu mengantarkan lulusan menembus perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia.

"Kami akan terus berinovasi mengantarkan siswa terbaik ke universitas top dunia," ujar Adhi.

Pemerintah membedakan Sekolah Garuda dengan Sekolah Rakyat yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Sekolah Garuda fokus menyiapkan siswa berprestasi agar memiliki daya saing global di bidang sains. (ANT/AZM)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penertarikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, terhadap barang jaminan debitor: Ade Ilham Maulana dilingkup berupa:

Objek Lelang	Keterangan
1 (satu) bidang tanah seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya dijual dalam 1 (satu) paket sesuai dengan SHM No. 02413/Setu, tercatat atas nama Ade Ilham Maulana, yang terletak di Komplek Barana Serpong Cluster Lenggana K2 No. 7 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	- Nilai Limit Rp910.000.000,- - Jaminan Penawaran Lelang Rp182.000.000,- - Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang diisytikarkan (tidak boleh dicicil). - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB). - Penangan lelang akan dikenakan PPN sebesar 1,2%. - Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankn menjadi beban peserta lelang. - Pengisian BPTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.

Cara Penawaran	: Open Bidding
Hari dan Tanggal	: Kamis, 23 Juli 2026
Batas Akhir Waktu Penawaran	: Kamis, 23 Juli 2026 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penawaran	: Sejak Tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Alamat Domaian	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Tangerang I, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang
Penetapan Penangan	: Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	: 2% dari harga lelang
Informasi Lebih Lanjut	: KPKNL Tangerang I (021) 5771198, 98283200 dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru, Telp. 021- 723567 (hunting) 7201053, 7201058 / 081380208247 dan 082187917149
Syarat-syarat lelang	: - Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. - Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan prosedur" dan panduan penggunaan pada website tersebut. Objek lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas pihak-pihak yang berkepentingan/pemast lelang tidak dipertanggungjawabkan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I (Pjabat Lelang) dan PT. BRI Persero Tbk. - Peserta Lelang diwajibkan melihat, dan dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang yang ditawarkan dengan keadaan apa adanya (as is). - Lelang dapat dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, sesuai ketentuan.

Jakarta, 09 Juli 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru

PENGUMUMAN DAFTAR PEMBAGIAN

Sehubungan dengan pembagian dalam Kepailitan PT Multisari Langgengjaya (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat No. 87/Pdt.Sus/PKU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Januari 2025, serta berdasarkan Penetapan No. 87/Pdt.Sus/PKU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 Juli 2026, maka berdasarkan Pasal 192 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan ini diberitahukan kepada Kreditor bahwa Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) yang telah disetujui Hakim Pengawas tanggal 8 Juli 2026 telah dapat dilihat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bagi Para Kreditor yang berkeberatan atas daftar pembagian tersebut dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 9 Juli 2026
Tim Kurator
PT Multisari Langgengjaya (Dalam Pailit)
TTD Song Tinus, S.H Hendra Yudhy Nasution, S.H.,M.H Jeffery Jeremias, S.H.,M.H

LEBIH MUDAH

AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

DOWNLOAD SEKARANG

APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

E-PAPER

PORTAL BERITA

YouTube Channel

Penuhi Permintaan Jepang dan Eropa

Tangkapan Ikan Tuna Lebak Tembus Pasar Ekspor

LEBAK, BANPOS - Tangkapan ikan tuna di pesisir selatan Kabupaten Lebak, menembus pasar ekspor ke Jepang dan sejumlah negara di Benua Eropa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan di daerah itu.

"Kualitas dan mutu ikan tuna dari pesisir Lebak masuk kategori terbaik di Indonesia dan populasinya melimpah di Perairan Samudera Hindia," kata Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah di Lebak, kemarin.

Selama ini, ikan tuna jenis ikan pelagis besar menjadi andalan ekonomi masyarakat pesisir selatan Kabupaten Lebak, karena nilai jualnya cukup tinggi hingga Rp45.000 sampai Rp60.000 per kilogram.

Selain itu juga ikan tuna menembus pasar ekspor ke Jepang dan sejumlah negara di Benua Eropa melalui perusahaan dari Jakarta.

Namun, ikan tuna ekspor itu yang beratnya sekitar 20 kilogram per ekor.

Saat ini, populasi jenis ikan besar itu habitatnya di perairan Samudera Hindia laut dalam, sehingga memiliki kualitas terbaik.

"Kita memiliki potensi besar tangkapan jenis ikan pelagis di perairan Samudera Hindia itu," katanya.

Menurut dia, pihaknya memastikan perputaran uang dari hasil tangkapan nelayan berdasarkan laporan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mencapai Rp5 miliar per bulan dan terbesar dari ikan tuna. Saat ini, jumlah nelayan aktif di pesisir selatan Lebak tercatat 4.462 nelayan dengan ditopang 216 unit kapal berukuran 11-20 GT tersebar di 11 TPI dengan produksi tangkapan sekitar



Kapal nelayan pesisir selatan Lebak, Banten bersandar di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Binuangun untuk siap melaut.

7.000 ton per tahun.

Populasi kelompok ikan tuna beraktivitas secara bergerombol dan melakukan migrasi.

Oleh karena itu, ikan dalam kelompok ikan besar mengandung minyak hingga 30 persen di jaringan tubuh mereka dan dalam rongga perut

ikan-ikan besar yang banyak mengandung minyak dan memiliki kandungan protein cukup besar.

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas tangkapan ikan tuna, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan lemari pendingin untuk tem-

pat penyimpanan ikan nelayan atau cold storage.

"Penyaluran bantuan lemari pendingin agar ikan tangkapan nelayan tetap berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Ketua Koperasi

Nelayan Bina Muara Sejahtera Binuangun, Kabupaten Lebak, Wading mengatakan produksi tangkapan nelayan untuk jenis ikan tuna ekspor melalui perusahaan dari Jakarta.

Bila musim ikan tuna hingga mencapai tangkapan sekitar 60 ton

per bulan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan.

"Kami memiliki anggota hingga ratusan anggota yang profesinya nelayan dan kehidupan mereka sejahtera dari hasil tangkapan ikan tuna itu," katanya menjelaskan.(ANT/RUS)

Pemkot Tangerang Bantu Akses Berwirausaha PPKS

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota Tangerang, menyiapkan pendampingan, akses hingga membantu perizinan berwirausaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mengikuti pelatihan untuk dapat memanfaatkan peluang usaha bagi kesejahteraan keluarganya.

"Setelah mereka selesai pelatihan para peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing," kata Wali Kota Tangerang Sachrudin usai menghadiri pelatihan tata boga bagi PPKS di SMKN 3 Kota Tangerang, kemarin.

Wali Kota Sachrudin menegaskan pemberdayaan masyarakat harus dimulai dengan membekali keterampilan yang dapat menjadi sumber penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Pelatihan ini bukan sekadar mengajarkan cara memasak, tetapi menjadi bekal bagi bapak dan ibu untuk membangun kemandirian ekonomi. Kami ingin setiap peserta memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha, sehingga mampu meningkatkan tarafhidup keluarga," ujar Sachrudin

Pemerintah Kota Tangerang, katanya, juga terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan vokasi merupakan salah satu langkah nyata dalam menekan kerentanan sosial sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Dinas Sosial Kota Tangerang dan SMK Negeri 3 Kota Tangerang dalam menghadirkan program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ia pun berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan ilmu yang diperoleh sebagai modal untuk membuka usaha maupun menciptakan peluang ekonomi baru.

Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam mencetak masyarakat yang memiliki kompetensi dan siap bersaing," katanya.(ANT/RUS)

BI Perkuat Koordinasi, Kendalikan Inflasi

JAKARTA, BANPOS - Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah dalam mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global.

"Kami terus berkoordinasi pusat dan daerah menjaga inflasi karena harga global naik," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, kemarin.

Perry menambahkan koordinasi dalam menjaga inflasi tersebut penting agar inflasi tetap terkendali sehingga masyarakat sejahtera dan fiskal moneter tetap kuat.

"Sehingga sama-sama inflasi itu terjaga, rakyatnya sejahtera dan fiskal moneter tetap kuat dan InsyaAllah tetap kuat," katanya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI. "Ke depan, Bank Indonesia



Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi

sebesar 3,34 persen. Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen. (ANT/RUS)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
(TENTANG SERTIPKAT HILANG)
Nomor: 44 / Peng - 36.73.HP.02.01 / VII / 2026

Untuk mendapatkan Sertipkat baru sebagai pengganti Sertipkat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini dimunkan bahwa:

No	Nama/ Alamat Pemohon	1. Jenis dan Nomor Hak 2. G55/Ur Nomor/tahun 3. Luas (M ²)	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan/Blok b. Desa/Kel. c. Kecamatan	Keterangan
1.	DAHLIA / KP Pasar Jombang, RT. 003, RW. 0.13, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	1. HM 5371 2. Surat Ukur No. 01600/ Jombang/2017 3. 110 M ²	DAHLIA	26-05-2017	a. - b. Jombang c. Ciputat	- Surat Laporan Kehilangan Tgl 10-12-2025 No. STPLK C/71/10/2025/SPKT/Polres Tangerang Selatan; - Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji, Tanggal 22-06-2026
2.	RENDI JULIARI / KP Pasar Jombang, RT. 003, RW. 0.13, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	1. HM 5499 2. Surat Ukur No. 1766/ Jombang/2017 3. 195 M ²	RENDI JULIARI	26-05-2017	a. - b. Jombang c. Ciputat	- Surat Laporan Kehilangan Tgl 10-12-2025 No. STPLK C/71/10/2025/SPKT/Polres Tangerang Selatan; - Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji, Tanggal 22-06-2026
3.	DR. MUJITAHID AHMAD DJOJOSUGITO / Cip Besar Selatan, RT.008, RW. 005, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	1. HM 57 2. Gambar Situasi No.1318/1983 3. 560 M ²	DR. AHMAD DJOJOSUGITO	26-05-2017	a. - b. Jurang mangu Timur c. Pondok Aren	- Surat Laporan Kehilangan Tgl 08-06-2026 No. STPLK C/296/VI/2026/SPKT/Polres Tangerang Selatan; - Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji, Tanggal 03-07-2026
4.	FERDINANDUS HILMAN / Jalan Camar XXIII Blok BP/5, RT. 008, RW. 008, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	1. HGB 3889 2. Surat Ukur No. 06080/ Buaran/2023 3. 63 M ²	FERDINANDUS HILMAN	22-11-2017	a. - b. Buaran c. Serpong	- Surat Laporan Kehilangan Tgl 12-06-2026 No. STPLK C/296/VI/2026/SPKT/Polres Tangerang Selatan; - Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji, Tanggal 03-07-2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipkat tersebut diatas, maka sertipkat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipkat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Tangerang Selatan, 08 Juli 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
TTD
David Agam, SH., M.H.
NIP. 19851026 200903 1 001

PENGUMUMAN KEDUA MELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. BRI (Pewaris) Tuk Kantor Cabang Jakarta Kramat, dengan penunjukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I melalui jasa Pro Lelang PT. Globalindo Auction akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap aset jaminan diukur AULUS SUSILO sebagai berikut:

- 5 (lima) bidang tanah dalam satu tanggungan dengan luas total 378 m² dan segala sesuatu yang berwujud/terpasang di atasnya diikat dalam satu paket sesuai:
 - SHM No. 9194/Sawah seluas 473 m²
 - SHM No. 9195/Sawah seluas 45 m²
 - SHM No. 9196/Sawah seluas 45 m²
 - SHM No. 9197/Sawah seluas 45 m²
 - SHM No. 9198/Sawah seluas 58 m²

Kebanyakan landak/ada nama AULUS SUSILO terletak di Blok D, Kelurahan Semah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (selengkapnya tertera sebagai K/Ciputat Baru D.A25).
Nilai Limit: Rp. 293.999.000,- (Setoran uang jaminan Rp. 93.000.000,-)

Yang akan dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2026
- Waktu Penawaran: Sejak isiang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran: Kamis, 23 Juli 2026
- Pukul: 09.30 WIB (sesuai Waktu Server)
- Tempat Lelang: KPKNL, Tangerang I
- Penetapan Penawaran: Ji. Taman Makam Pahlawan (T.M.P) Tanura, Kota Tangerang
- Batas Lelang Pembeli: Setelah batas akhir penawaran
- Pelaksanaan Lelang: 2% (dua persen) dari harga lelang
- Pelaksanaan Lelang: Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Lelang dilakukan secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang dengan penawaran terbaik (open bidding) pada website <https://lelang.go.id> dengan memperhatikan menu "Syarat dan Ketentuan".
- Calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website tersebut dan wajib memayorkan uang jaminan lelang HARUS sesuai dengan pengumuman lelang / selanjutnya (tidak boleh di peroleh-pecah) paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang.
- Penerangan lelang dilaksanakan PPN sebesar 1,1% dan harga terjual lelang dipungut langsung oleh PT. BRI (Pewaris) Tak pada saat penyelesaian sertifikat.
- Pengumuman BPKTS atau penunjukan lelang diserahkan kepada pemenang lelang pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Pewaris lelang dapat melihat objek yang akan dilelang sejak pengumuman lelang diartikan dengan kondisi apa adanya (as is) dan dapat menghubungi PT. Globalindo Auction Telephone: (021) 451 7045, HP: 0813 3331 5038, 0813 1160 2279 atau www.globalindo-auction.com, atau KPKNL, Tangerang I Telp: (021) 55794272

Pelaksana Lelang: Pelaksana Pro Lelang: Jakarta, 09 Juli 2026
Ttd
KPKNL TANGERANG I GLOBAL Auction: PT. BRI (Pewaris), Tbk.



**SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI
BANTEN**

H. IMRON ROSADI, Lc.
Wakil Ketua DPRD

BARHUM HS, S.IP.
Wakil Ketua DPRD

H. FAHMI HAKIM, S.E.
Ketua DPRD

YUDI BUDI WIBOWO
Wakil Ketua DPRD

EKO SUSILO, S.E.
Wakil Ketua DPRD

Banyak Siswa Tak Tertampung di Sekolah Negeri Penambahan Sarana Jadi Solusi

“Kerja dewan bisa 24 jam. Karena banyak kegiatan non-schedule yang harus kami jalankan dalam melayani aspirasi masyarakat. Bahkan, kegiatan non-schedule bisa lebih banyak dibandingkan kegiatan yang sudah resmi terjadwalkan di DPRD Provinsi Banten. Mengingat dewan harus selalu siap. Harus aspiratif terhadap hal-hal yang disampaikan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS, SIP, MIP.

Pernyataan politisi asal PDI Perjuangan tersebut menjadi gambaran bahwa selaku wakil rakyat, dewan harus selalu siap bertemu dan menampung aspirasi masyarakat. Apakah saat berkunjung ke masyarakat dan melihat kegiatan sekaligus kondisi masyarakat maupun saat menerima kedatangan masyarakat di rumah maupun di sekretariat partai dan gedung dewan.

Di DPRD Banten memang banyak kegiatan formal untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Akan tetapi, kegiatan itu belum cukup untuk mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi masyarakat.

Aspirasi yang sering disampaikan masyarakat pada masa penerimaan siswa baru salah satunya adalah terkait dengan banyaknya calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB). Calon siswa tidak tertampung di sekolah negeri, karena daya tampung

sekolah negeri belum sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah pertama sederajat.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa siswa menginginkan masuk sekolah negeri. Memang banyak juga yang memilih sekolah swasta tertentu, tetapi harus diakui sebagian besar masyarakat ingin masuk sekolah negeri. Permasalahannya, tidak semua siswa yang ingin masuk sekolah negeri bisa tertampung. Maka sebagai wakil atau

wali siswa, perlu memberikan pengarahannya, agar tidak putus sekolah, meski tidak masuk sekolah negeri. Dan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana, supaya lebih banyak lagi yang masuk sekolah negeri,” katanya.

Peningkatan sarana tersebut, katanya, bisa diarahkan pada program penambahan ruang kelas baru atau unit sekolah baru. Penambahan sarana tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan atau jumlah calon siswa yang akan melanjutkan ke sekolah menengah atas.

Peningkatan sarana juga bisa diarahkan pada penyediaan berbagai fasilitas sekolah, seperti laboratorium. Hal itu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten.

Penyediaan fasilitas tersebut, kata

politisi asal PDI Perjuangan itu, tidak sebatas sekolah negeri, tetapi juga bisa menyoal ke sekolah swasta.

“Meskipun saat ini sekolah swasta sudah mendapatkan program sekolah gratis, tapi ada saja keluhan, karena tidak masuk negeri. Perlu tuntutan, supaya orang tua tidak merasa kecewa. Kendati demikian, memang kita masih perlu sarana prasarana, baik sekolah baru maupun penambahan kelas baru. Termasuk juga memerhatikan sekolah swasta,” ujarnya.

Masih terkait dengan pengembangan sekolah swasta, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang merupakan Koordinator Komisi V DPRD Provinsi Banten ini mengatakan bahwa sekolah swasta perlu membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama tersebut salah satunya melalui fasilitasi Dinas Pendidikan.

“Bekerja sama dengan industri dalam pengembangan sekolah, seperti penyediaan laboratorium atau sarana laboratorium. Apa yang sekolah swasta butuhkan. Dindik bisa memfasilitasi bekerja sama dengan industri untuk menopang ketersediaan sarana sekolah swasta,” ucapnya.

Selaku Koordinator Komisi V, ia terus mendorong Dindikbud agar terus mengembangkan konsep dalam meningkatkan kualitas lulusan sekolah. Sehingga ke depan, lulusan sekolah di Banten semakin berkualitas. (ADV)



Barhum HS, SIP, MIP.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten

Sekolah Kejuruan Harus Disesuaikan dengan Potensi Wilayah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS, SIP, MIP mengatakan, keberadaan sekolah kejuruan di Provinsi Banten harus disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Jika suatu wilayah di Provinsi Banten lebih banyak potensi pertanian maka jurusan sekolah kejuruan tersebut diarahkan dapat menampung penggalan sumber daya di daerah tersebut.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang merupakan Koordinator Komisi V. Salah satu bidang pengawasan Komisi V adalah sektor pendidikan.

“Penempatan sekolah kejuruan harus disesuaikan dengan potensi wilayah. Misalnya di Pandeglang bisa diprioritaskan sekolah kejuruan bidang pertanian. Sehingga ke depan siswa bisa menjadi ahli pertanian, dan bisa mengembangkan pertanian di wilayahnya,” ujarnya.

Barhum mengatakan, bahwa potensi daerah di Provinsi Banten berbeda-beda, seperti Tangerang Raya yang lebih banyak industri, perdagangan dan jasa, sedangkan wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang lebih banyak sektor pertanian.

Terkait peningkatan kualitas lulusan sekolah, katanya, Pemprov Banten harus fokus dan konsisten

terhadap program yang dicanangkan. “Kebutuhannya apa, infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

“Harus ada metode bagus untuk menciptakan kemandirian dan kualitas. Guru pun perlu peningkatan sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Banten,” tambahnya.

Terkait sekolah unggulan, politisi asal PDI Perjuangan itu meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Banten meningkatkan manajemen pendidikan sekolah Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) yang berlokasi di

Kabupaten Pandeglang.

“Kami mendapatkan aspirasi tentang CMBBS. Dan setelah kami pantau ternyata manajemennya perlu diperbaiki. Sekarang sudah ada perbaikan, dan sekarang menuju sekolah terbaik,” katanya.

Bukan hanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah di Banten, katanya, Pemprov Banten perlu memberikan beasiswa terhadap siswa terbaik yang ke depan bisa diberdayakan Pemprov Banten untuk membangun Banten.

“Pemberian beasiswa tidak melihat kasta, tetapi benar-benar siswa terbaik, yang ke depan bisa memberikan kontribusinya untuk daerah. Dari kita untuk kita,” kata Barhum. (ADV)

